DR. MHD. SYAHMINAN, M.AG
PROF. DR. KATIMIN, M.AG

KONFLIK, OTORITAS DAN KEBIJAKAN

DI SUMATERA UTARA

Perdana Publishing

KONFLIK, OTORITAS, DAN KEBIJAKAN DI SUMATERA UTARA

KONFLIK, OTORITAS, DAN KEBIJAKAN DI SUMATERA UTARA

Dr. Mhd. Syahminan, M.Ag
Prof. Dr. Katimin, M.Ag

Perdana Publishing

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

KONFLIK, OTORITAS DAN KEBIJAKAN DI SUMATERA UTARA

Penulis: Dr. Mhd. Syahminan, M.Ag., dan
Prof. Dr. Katimin, M.Ag

Copyright © 2018, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rigths reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia@rt

Diterbitkan oleh:
PERDANA PUBLISHING
Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama : Desember 2018

ISBN 978-602-5674-87-7

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh
bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa
izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

Perbedaan pandangan dalam politik, dan kepentingan di Indonesia pada saat ini telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Perbedaan cara pandang tentang sejarah kelam Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia contohnya menyebabkan anak bangsa terpecah dalam kubu politik bahkan menyeret latar belakang agama dan menyulut ketegangan. Padahal Konflik adalah satu keniscayaan yang dapat terjadi dalam kehidupan sosial termasuk kehidupan antar umat beragama, karena konflik sesungguhnya adalah perbedaan pandangan atau kepentingan baik antar individu maupun antara kelompok masyarakat. Contohnya, perbedaan dalam pemahaman ketuhanan saja merupakan suatu konflik. Konflik yang harus dicegah adalah konflik yang mencari jalan keluarnya dengan kekerasan. Tingkatan paling rendah dalam penyelesaian konflik adalah melarikan diri dari konflik tersebut tanpa menyelesaikan masalahnya. Ketika masalah yang dihindari itu terakumulasi dan muncul dipermukaan, maka penyelesaiannya cenderung akan dipaksakan, dimana pemaksaan tersebut dapat menyulut jalan kekerasan. Konflik seharusnya dihadapi dan dikelola sehingga menghasilkan kesepakatan dalam kehidupan sosial yang harmoni.

Konflik kekerasan di Indonesia selalu muncul dari waktu kewaktu. Mulai dari konflik pertanahan di Sumatera Utara, yang telah dimulai pada masa Revolusi Sosial pada awal kemerdekaan, koflik Maluku pada awal 90 an, konflik Poso, Konflik Kalimantan, hingga konflik skala lokal seperti di Tolikara Papua, dan kerusuhan Mei 1998 yang menjurus SARA. Di Sumatera Utara sendiri konflik kekerasan telah terjadi berulang kali. Sebut saja konflik pertanahan mulai dari Deli Serdang hingga Tapanuli Selatan dimulai sejak masa penjajahan VOC hingga saat ini,

konflik antara nelayan tradisional di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai sejak tahun 1997, konflik antara organisasi kepemudaan di kota Medan dan Tebing Tinggi tahun 1992, keributan penggusuran warga di bantaran rel kereta api tahun 2015 dan yang terakhir adalah konflik penempatan pengungsi di Kabupaten Karo tahun 2016 dan konflik kekerasan dengan pembakaran vihara dan klenteng di Tanjungbalai tahun 2016. Konflik disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain faktor identitas yang terancam, pemenuhan kebutuhan manusia, maupun kesalahpahaman antar budaya, ketidakpercayaan dan permusuhan[1]. Konflik di Tanjungbalai misalnya disebabkan keterancaman satu identitas budaya dan agama yang memunculkan ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok. Bila dilihat keterancaman identitas satu kelompok dari kelompok lain, maka heterogenitas suatu masyarakat menjadi potensi terjadinya konflik. Dapat dilihat bahwa Kota Tanjungbalai cukup heterogen walau tetap dominasi mayoritas muslim. Berdasarkan data kependudukan dan catatan sipil Kota Tanjung Balai tahun 2015, komposisi 183.107 penduduk Tanjung Balai berdasarkan agama meliputi beragama Islam 84,66%, agama Budha 6,30 %, Kristen Protestan 8,19 %, Kristen Khatolik 0,81%, Hindu 0,03% dan lainnya 0,01 %[2]. Medan yang memiliki komposisi penduduk cukup heterogen; Islam 59,68%, Protestan 20,71%, Katolik, 7,1%, Hindu 2,1%, Budha 10,37% dan lainnya 0,03%[3] tidak terjadi eskalasi konflik kekerasan yang melibatkan antar agama[4]. Demikian Pula Kota Tebing Tinggi yang didominasi oleh mayoritas Muslim yakni 78% [5]tidak terjadi konflik, bahkan terbangun keharmonisan antar umat beragama.

Konflik-konflik khususnya di Sumatera Utara, umumnya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Namun banyak diantara konflik tersebut

---

[1] Simon Fisher and Friends, Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak, 2000, British Council, Jakarta, hal. 8 - 9

[2] http://tanjungbalaikota.go.id/agama-adat-dan-budaya

[3] Kantor Kementerian Agama Kota Medan, dalam Kota Medan Dalam Angka 2016, 2016, Badan Pusat Statistik Kota Medan, Hal. 179.

[4] http://kotaMedan.go.id/Kota Medan Dalam Angka 2016

[5] http://.Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi/ Tebing Tinggi Dalam Angka 2016

tetap tersembunyi dan tidak terselesaikan sehingga seperti bom waktu yang dapat meledak satu waktu dan menyebabkan kekerasan yang meluas. Para pemuka agama dan budaya kerap menjadi garda terdepan dalam penyelesaian konflik. Para pemuka yang berada dalam organisasi keagamaan dan budaya atau yang terkumpul dalam asosiasi antar agama dan atau budaya menjadi corong terdepan dalam mengkampanyekan perdamaian. Namun tidak jarang juga para pemegang otoritas agama dan budaya ini juga dapat menjadi pemicu dan menstimulasi konflik dalam masyarakat. Pada sisi yang sama para pemuka agama, budaya dan pemerintah, sebagai pemegang otoritas eksekutif, menjadi pembuat kebijakan yang dijalankan dalam kehidupan beragama dan bernegara, seperti halnya di Tanjung Balai dan Medan. Bila merujuk pada hubungan agama dengan pemerintah, maka Indonesia termasuk tipe yang *the government supports religion in general, but give nomarked prefential treatment to any one religion*[6]. Dengan demikian Indonesia mendorong agama kehidupan agama dan melindungi berbagai aliran kepercayaan, namun bukan negara agama dan bukan juga negara sekuler. Kebijakan di buat negara untuk menjamin umat beragama dapat terlindungi menjalankan ibadah agamanya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Namun, bila dilihat konflik Tanjung Balai, maka kebijakan kesepakatan bersama dalam kehidupan beragama, mendapat interpretasi berbeda antar umat.

Kota Medan juga memiliki kebijakan bersama dalam Forum Komunikasi antar Umat beragama (FKUB) tentang rumah ibadah. Kebijakan dalam pengaturan hubungan antar kelompok; agama, etnis atau hubungan sosial dapat menjadi pendorong integreasi sosial, namun pada sisi lain dapat juga menjadi penyebab disintegrasi sosial. Dengan demikian dapat dipahami bahwa struktur dan kebijakan yang dibuat oleh otoritas kembali diinterpretasikan berbeda oleh para pemuka agama, budaya dan juga oleh masyarakat. Interpretasi berbeda tersebut yang berpotensi memunculkan konflik kembali.

---

[6] Vernon dalam Afif Muhammad, Agama dan Konflik Sosial, Studi Pengalaman Indonesia, 2013, Penerbit Marja, Bandung. Hal 19-20.

Dalam buku ini dilakukan pemaparan tentang eskalasi konflik di dua kota; Medan dan Tanjungbalai, yakni perbedaan situasi konflik didua wilayah tersebut, peran kebijakan dan otoritas yang ada didua kota tersebut sehingga situasi konflik, akar dan penyelesaiannya dapat berbeda. Kemudian mendeskripsikan situasi, penyebab dan penyelesaian Konflik, peran kebijakan dan otoritas di dua kota di Sumatera Utara baik sebagai penyebab atau sebagai penyelesai konflik.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar v
Daftar Isi ix

BAB I
KONFLIK, KEBIJAKAN DAN OTORITAS 1
A. Konflik 1
B. Kebijakan 9
C. Otoritas 14

BAB II
PROVINSI SUMATERA UTARA 17
A. Geokrafis 17
B. Demokrafis 22
C. Kearifan Lokal 32

BAB III
SITUASI DAN KONFLIK DI SUMATERA UTARA 35
A. Kota Medan 35
1. Sejarah 35
2. Geografi 44
3. Demografis 45
4. Konflik di Kota Medan 49
B. Tanjung Balai 53
1. Geografis 53

2. Luas Wilayah, Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan 54
3. Potensi Unggulan Daerah 55
4. Sejarah 56
5. Konflik dan Integrasi 68

BAB IV
KONFLIK, OTORITAS DAN KEBIJAKAN 78
A. Konflik 78
B. Otoritas 81
C. Kebijakan 84

BAB V
PENUTUP 87

DAFTAR PUSTAKA 89

BAB I

KONFLIK, KEBIJAKAN DAN OTORITAS

A. Konflik

1. Pengertian

Konflik didasari oleh adanya perbedaan kepentingan, tujuan dan kebutuhan antara dua kelompok atau lebih. Secara sederhana konflik dimengerti sebagai pertentangan, persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosial antara dua atau lebih pihak yang bertentangan[1]. Pada konteks ke-Indonesiaan, masyarakat cenderung rentan terjadi konflik karena 1) tingginya tingkat segregasi sosial berbasis pada identitas keagamaan, etnis dan golongan; 2) Identitas kolektif menjadi mekanisme mobilisasi kekerasan 3) Kelembagaan kelola konflik adat yang telah mengalami pelemahan akibat modernisasi politik[2].

Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa dinamika konflik ditentukan oleh keberadaan kelompok sosial berbasis pada identitas, golongan, etnis dan tribal. Berbagai kelompok sosial itu melakukan berbagai gerakan untuk memenangi dan menguasai, *to rule*[3]. Konflik dapat didasari pada kepentingan yang bermacam-macam, namun manusia kemudian

---

[1] Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik, 2014, Prenada Media Group, jakarta, Hal. XViii

[2] Ibid, Viii

[3] Ibnu Khaldun dalam Ibid, Hal. 20

menstrukturasi kelompoknya dalam memenangi pertentangan kebutuhan dan tujuannya.

2. Teori Kekerasan

Konflik merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Situasi yang dapat menimbulkan persoalan bila konflik yang terjadi adalah konflik kekerasan dalam memenangi konflik tersebut. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang atau kelompok lain[4]. Simon Fisher dkk. Mendefenisikan kekerasan sebagai tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.[5] Definisi lain mengenai kekerasan dikemukakan oleh Galtung, yakni:

> *Kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Kekerasan disini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual, disatu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada didalam dan dilain pihak potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya*[6] (Santoso, 2002:168).

Kata kekerasan sepadan dengan kata "*violence*" dalam bahasa Inggris, diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan

---

[4] Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, 2002, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 11

[5] Fisher Simon, (2000), Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak, The British Council, Jakarta, hal. 4

[6] Galtung dalam Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 168

kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kekerasan adalah tindakan agresi dengan menggunakan kekuatan fisik atau psikis yang dapat merugikan dan menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologis.

Di Indonesia saat ini berkembang kekerasan yang dikenal dengan kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam aturan hukum Indonesia didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yakni setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[7] Dalam Undang-Undang PKDRT di kenal ada 4 jenis kekerasan yakni: Kekerasan Phisik, kekerasan Psikis**,** kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan phisik (pasal 6 UU PKDRT) yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sementara kekerasan psikis (pasal 7) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual (pasal 8) didefinisikan sebagai

a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

[7] Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Kekerasan seksual dimaksudkan sebagai setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk terakhir dari kekerasan dalam UU PKDRT adalah penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga didefinisikan sebagai (1) menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, (2) perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Penyebab Konflik

Pada dasarnya Konflik lebih disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepentingan, pisik, psikis dan sosial, dimana terjadinya interaksi antara seseorang dengan orang lain atau kelompok dengan kelompok lain yang memimiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan pisik misalnya, berhubungan dengan wilayah tempat tinggal, sifat ovensif, penguasaan lahan *landerform*, oleh sekelompok masyarakat tertentu, sehingga yang lainnya tergusur, dominasi dan penguasaan sumber-sumber kebutuhan makanan, peralatan, dan sumber-sumber kebutuhan hidup lainnya; pakaian, tempat tinggal. Disamping itu perbedaan-perbedaan pisik, termasuk warna kulit, bentuk tubuh (seks), sifat-sifat pisik yang merupakan sifat genitas suku atau ras antar kelompok ras, etnis, kelomok agama dan kepercayaan. Satu sisi merupakan penyebab terjadinya konflik. Meskipun perbedaan alamiah ini tidak sepenuhnya akan menjadi sebab-sebab konflik. Biasanya konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan pisik (ras atau etnis) hanya sebagai pemicu, tidak esensial dalam konflik. Tetapi konflik yang disebabkan oleh paktor pisik memiliki dampak yang luas dalam masyarakat. Tetapi pada sisi lain perbedaan warna kulit, sifat tubuh, bentuk tubuh, adalah salah satu daya tarik untuk menjadikan integrasi dalam masyarakat. Karena perbedaan akan selalu membuat

masyarakat menjadi saling menghormati dan memelihara tatanan soisal.

Dalam hal psikhis; agama dan kepercayaan, kepuasan masyarakat terhadap kebijakan dan otoritas dan pelaksanaan kebijakan, hukum; ketidakadilan sosial. Dan sosial; berbagai ketimpangan sosial antara kelompok kaya dan miskin, elit sosial dan kaum lemah lainnya.

Sedang konflik sendiri tidak sepenuhnya bersifat negatif bila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, karena konflik akan berlanjut dengan integrasi, bahkan meningkatkan konsolidasi sosial, penguatan terhadap sosial dan menimbulkan kefahaman yang kuat, disebabkan oleh konflik itu sendiri. Menurut Teori struktural fungsionl, konflik lebih dilihat sebagai upaya memperkuat struktur, sekalipun terjadi kegoncangan struktur dikarenakan oleh adanya konflik, tetapi akhirnya akan kembali terbentuk sesuai pola struktur yang ada. Teori ini menurut para ahli tidak progresif, tidak dinamis, karena kembali kepada struktur yang telah mapan. Tetapi ia boleh menjadi salah satu teori dalam sosiologi. Sedang teori sosiologi lain mengatakan, bahwa konflik secara positif adalah membangun struktur baru dengan membuat perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedang truktur lama cendrung hilang. Pola konflik yang terjadi tidak kembali kepada struktur tradisional. Konflik menumbuhkan struktur baru yang lebih baik dari struktur sosial lama. Jika pola konflik yang pertama dikemukakan Talcot Parsons, maka yang kedua dikemukakan oleh Karl Marx.

4. Dampak Konflik

Konflik sebagai proses sosial, dan merupakan unsur atau aspek dari soial itu sendiri, atau bahagian dari sosial yang membentuk pola-pola dan memberi bentuk, sifat dari sosial. Masyarakat itu sendiri secara dialektik merupakan hasil dari konflik, dimana terjadi *tesa, antitesa* dan *sintesa* yang secara terus mennerus membentuk pola sosial yang baru secara terus menerus kearah yang lebih baik. Ini artinya sosial itu bersifat dinamis, bukan statis. Aspek dinamis sosial terdapat pada *interaksi*, dimana terjadi pertemuan antar individu atau kelompok yang

berbeda-beda latar belakan, kepentingan, tujuan dan cara untuk memperoleh tujuan dan kepentingan masing-masing. Tetapi secara simultan proses itu terjadi secara serentak diantara semua unsur sosial, Karena itu konflik tidak dapat dielakkan karena interaksi dari itu semua. Pertama, Konflik akan berdampak kepada struktur sosial itu sendiri, dengan perkembangan budaya yang semakin baik dan positif atau negatif, tergantung paktor-paktor yang terjadi dalam proses sosial. Jika positif akan meningkatkan pola interaksi yang semakin baik, dan jika negatif dapat kembali sebagai penyebab konflik begitu juga konflik berikutnya demikian terus hingga meruntuhkan pola struktur sosial yang ada. Sedang pola struktur sosial yang baru belum terbangun, hal ini menjadi transisi dalam struktur sosial, mengakibatkan terjadinya kegoncangan struktur dalam sosial, atau relativitas struktur, menyababkan anomali sosial, tidak adanya kontrol sosial, rapuhnya konstruk sosial, terjadinya kesewenang-wenangan tanpa penyelesaian hukum, dan tidak adanya kekuatan yang memaksa dalam sosial dan lain-lain. Meski masyarakat bagaimanapun kondisinya tetap memiliki struktus sosial, tetapi ketika konflik terjadi tanpa penyelesaian yang baik, maka struktur sosial yang ada dipandang tidak mampu dan layak, maka akan muncul kekuatan lain yang terkadang menyebabkan ambruknya sendi-sendi atau struktur yang ada. Kedua, Konflik mempengaruhi interaksi yang merupakan inti sosial itu sendiri. Interaksi sosial sebagai aspek dinamis yang menjadi inti sosial itu sendiri akan mengalami problem, dimana terganggunya hubungan, antar individu atau kelompok sosial, kemacetan hubungan biasanya tidak semata-mata menghambat hubungan, atau kemacetan interaksi tidak akan menghambat interaksi, hanya saja akan mengalami perubahan interaksi, atau ineraksi berubah kepada pola lain yang tidak biasa, jalur interaksi bersifat tertutup, atau tidak terbuka, sedikit-dikitnya dikatakan tidak harmonis. Interksi hanya sebatas kepentingan-kepentingan pokok saja, selebihnya masing-masing individu atau kelompok menahan diri dari interaksi yang lebih jauh. Dampak konflik tertutup atau terbuka menimbulkan ketidak stabilan pada interaksi sosial, justru jika konflik tertutup semakin lama akan menimbulkan friksi, kecurigaan, kebencian dan dendam, yang suatu waktu hanya menunggu momennya saja untuk meledak. Dan pola kles sosial itu terkadang hanya kecil tetapi

cukup untuk menjadi sebab ledakan yang besar dalam masyarakat. Jadi interaksi yang tertutup dapat menjadi problema interaksi menyebabkan kecurigaan, dan konflik teertutup dan akan terjadi kles sosial sebagai sebab ledakan konflik yang lebih besar, kles sosial hanya sebagai sebab kecil saja yang mengakibatkan konflik besar yang lebih menjadi sebab yang sesungguhnya dari konflik, hal ini sering terjadi kles sosial hanya terdapat dipermukaan, tetapi yang sesungguhnya ada konflik yang lebih besar dan ini berhubungan dengan interaksi, dan berakibat terhadap interaksi itu sendiri.

5. Akibat Positif

Konflik bisa saja dipandang sebagai bersifat negatif yang dapat menghilangkan interaksi yang harmonis bahkan meruntuhkan pola sosial, institusi soaial yang terbangun bahkan memutuskan interaksi, lebih jauh dapat melenyapkan suatu kelompok dengan adanya konflik besar seperti perang, penghilangan atau penghapusan kelompok tertentu (*genosida*), hal ini sering terjadi dalam sejarah konflik sepanjang zaman.

Secara toritis, sosiologi memangdang konflik tidak saja berdampak negatif seperti diatas, tetapi sebaliknya berdampak positif dalam masyarakat. Masyarakat merupakan organ yang hidup dan dinamis ibarat tubuh ia dapat memperbaiki sendi-sendi yang mengalami kerusakan pada tubuh itu sendiri. Proses itu terjadi pada sosial yang mengalami konflik, dimana masyarakat yang antara satu dengan lainnya membutuhkan, karena itu tidak ada masyarakat yang selamanya akan tetap dalam kemacetan interaksi, dan atau pola sosial yang sakit, tidak harmonis. Pembentukan kembali pola sosial kepada pola baru akan terjadi kembali meski terkadang harus dibantu dengan kekuatan sosial lain, seperti peran pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, atau adanya kebutuhan bersama, kepentingan bersama yang lebih besar dari konflik yang terjadi. Setelah konflik akan ada *resolusi* (perdamaian), yang menimbulkan kerukunan kembali dalam masyarakat. Terbentuknya pola-pola hubungan sosial baru yang lebih baik dan dapat memperkuat soliditas dan solidaritas sosial yang lebih baik.

6. Akibat Negatif

Akibat negatif dari konflik dapat meruntuhkan pola sosial yang telah ada dan sepanjang belum terbentuk pola baru yang diterima bersama akan menyebabkan labilitas sosial, anomaly, kondisional yang tidak stabil, melemahkan kepcayaan, dan lemahnya pengawasan sosial, tidak adanya kekuatan yang memaksa yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dalam masyarakat. Meruntuhkan interaksi dan menimbulkan kecurigaan antar kelompok sosial dan akan menjadi kembali sebagai sebab konflik yang baru, demikian seterusnya. Bahkan dapat merusak sistim sosial, struktur sosial dan ketidak percayaan terhadap lembaga institusi sosial, dan setrusnya. Pola hubungan sosial yang sakit ditandai dengan ketidak harmonisan sosial. Interaksi hanya sebatas kepentingan-kepentingan pokok saja, sosial yang kaku dan bahkan akan menjadi keras dan kasar. Masyarakat mengalami destrukturisasi sosial ditandai dengan tidak harmonis, tidak soliditas dan tidak solidaritas, spertinya masyarakat terkoptasi pada ruang yang terpisah-pisah meskipun mereka dalam satu sosial, adanya sekat-sekat sosial dan polarisasi sosial kelompok. Secara sederhana dapat dilihat dalam interaksi bahwa masyarakat terpola kepada partikel sosial yang lebih kecil seperti timbulnya panatisme etnis, budaya, bahasa, agama, dan lain sebgainya.

7. Mengatasi Konflik

Sosial sebagaimana yang dikatakan diatas, bahwa Sosial bukanlah lembaga yang mati atau yang statis, melainkan ibarat tubuh yang hidup, ia akan kembali memulihkan keadaannya sebagaimana semula dengan proses alamiah. Secara alamiah struktur sosial akan memainkan peranannya dalam menemukan kembali solusi berbagai persoalan yang timbul akibat konflik. Struktur sosial yang dimaksud adalah struktur sosial yang memiliki fungsi atau peran didalam masyarakat itu sendiri yang dilakukan oleh berbagai kekuatan dari tokoh dan pemuka masyarakat atau dari pemerintah yang memiliki fungsi atau kekuatan memaksa (*otoritas*) berdasarkan hukum yang ada padanya.

Mengatasi konflik dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi-

fungsi atau peran-peran masyarakat yang merupakan kekuatan alamiah, atau penyeimbang terhadap konflik sosial. Peran atau fungsi sosial itu sendiri merupakan bahagian yang melekat dalam sosial itu sendiri. Sebenarnya fungsi-fungsi struktur sosial dapat memelihara dan menseimbangkan kondisi sosial, jika (peran dan fungsi) struktur sosial itu berfungsi, karena kekuatan struktur sosial itu berada didalam masyarakat yang senantiasa melihat dan mengetahui perubahan sosial dan gejolak sosial. Tetapi terkadang fungsi dan kekuatan struktur sosial itu tidak berfungsi sehingga jika terjadi pertentangan kepentingan dalam sosial maka konflik segera terjadi, karena fungsi dan peran struktur sosial tidak maksimal atau tidak berfungsi. Hal ini terjadi pada masa sekarang bahkan masyarakat tidak lagi secara jelas memiliki struktur sosial, melainkan hanya sebagai struktur tanpa bentuk dalam masyarakat. Artinya struktur sosial yang ada tidak memiliki otoritas fungsional, atau otoritasnya lemah disebabkan tidak memiliki landasan secara yuridis formal yang berbeda dari masyarakat tradisional dahulu, dimana tokoh-tokoh masyarakat memiliki otoritas dan dapat memutuskan kebijakan sosial. Memaksimalkan fungsi struktur sosial dengan memberikan proteksi kepada pemuka-pemika masyarakat untuk dapat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Oleh pemerintah melalui badan-badan sosial seperti LKMD (lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), FKUB (Forum Komuniasi Umat Beragama), FORKALA (Forum Komunukasi Antar Lembaga Adat) dan lain-lain. Ada juga yang bersifat formal yang memiliki unsur pemerintahan seperti keamanan, kepolisian dan stuan keamanannya. Dalam Masyarakat ada yang disebut Polmas (polisi masyarakat, ada Babinsa dari unsur Militer, ada satpol PP dari pemerintahan. Didalam masyarakat sendiri memiliki kekuatan-kekuatan seperti, adanya karang taruna, kepala desa/ lurah. Yang mempunyai fungsi dalam mengatasi konflik sosial yang terjadi.

B. Kebijakan

1. Pengertian

Otoritas hukum, kebijakan menjadi produk otoritas yang harus dipatuhi. Kebijakan didefinisikan secara umum sebagai ucapan dan

tulisan yang menjadi panduan bagi orang atau kelompok bertindak. Menurut *Friedrich (1969) dalam Agustino (2008:7) kebijakan merupakan* serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.[8] Dalam Konsep Riant Nugroho, analisa kebijakan menganalisa tiga fokus utama yakni, 1) Nilai, menganalisa pencapaian merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah masalah dapat teratasi, 2) Fakta, yang keberadaaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, 3) Tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Dalam menganalisa kebijakan dalam dilakukan *ex post* atau *ex ante*.[9]

2. Analisa kebijakan

Dalam Konsep Riant Nugroho, analisa kebijakan menganalisa tiga fokus utama yakni, 1) Nilai, menganalisa pencapaian merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah masalah dapat teratasi, 2) Fakta, yang keberadaaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, 3) Tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Dalam menganalisa kebijakan dapat dilakukan *ex post* atau *ex ante*.[10]

3. Dampak Integrasi

Konflik soaial sebagai gejala yang terdapat pada masyarakat dan merupakan sesuatu yang dapat dipastikan terjadi karena ia merupakan efek interaksi, disampin efek integrasi. Keduanya merupakan gejala sosial itu sendiri, bahagian dari kehidupan sosial, tidak ada masyarakat

---

[8] Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, 2008, AIPI, Bandung. Hal.7

[9] Riant Nugroho D. Analisa Kebijakan, 2007, PT Gramedia, Jakarta, hal. 13 - 14

[10] Ibid, hal. 13 - 14

yang tidak mengalami konflik, jika dikatan sebaliknya, maka tidak akan ada yang dikatakan masyarakat. Hanya saja jika masyarakat selalu mengalami konflik maka sebagai tanda masyarakat sedang sakit, tidak memiliki daya *imun* terhadap penyakit sosialnya. Integrasi sebagai salah satu aspek yang membuat masyarakat terikat dalam sosialnya, merupakan kebalikan dari konflik. Konflik dan integrsi maupun integrasi ke konflik. Selalu terjadi baik secara alamiah maupun atas dasar hukum. Integrasi dalam hal ini merupakan proses setelah terjadinya konflik yang didahuli oleh adanya resolusi, dimana adanya kesepakatan dan kesefahaman tentang problematik sosial yang terjadi. Integrasi dapat saja terjadi dengan dorongan atau keinginan bersama antar masyarakat yang konflik yang dibantu oleh peran struktur sosial dalam masyarakat, hal ini bersifat alamiah yang disebut integrasi alamiah, karena ia muncul dari dalam sebagai keinginan damai dan harmonisasi internal. Tetapi integrasi terkadang tidak dapat terjadi secara alamiah, karena beberapa faktor sosial yang keras, tuntutan dan motivasi negatif dari berbagai pihak yang konflik bahkan menjurus kepada tidak rasional (berlebihan) menjadikan integrasi tidak tercapai dengan sebak-baiknya. Hal ini terkadang diakibatkan oleh dendam lama, kebencian yang berlebihan, atau hal-hal yang sangat menyakitkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang berkonflik, menuntut adanya syarat-syarat yang sangat keras dan tegas, atau sesuatu yang bernilai tinggi (pembayaran, ganti rugi yang bersifat materi) atau mengaharuskan untuk melakukan semacam perbuatan yang mewakili permohonan maaf (seperti cara tradisionalgan yang bersifat kultur; *Pelagandong* di ambon) atau dengan memotong lembu dari pihak yang mersasa salah sebagai permintaan maaf dan lain sebagainya, kemudian akan terjadi integrasi. Dalam kasus konflik yang sederhana seperti membawa daun sirih yang bahagian tangkainya kebawah menunjukkan rasa bersalah dan memintak maaf (pada masyarakat Mandailing tempo dulu).

Integrasi dapat juga terjadi dengan adanya paksaan dimana penerapan hukum dilakukan oleh pemegang otoritas dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan problema (konflik) yang terjadi. Namum integrasi berdasarkan hukum , karena ia merupakan paksaan terhadap konflik, maka integrasi yang terjadi hanya terjadi dipermukaan saja tidak benar-

benar masuk kesendi-sendi sosial yang berkonflik. Oleh karena itu integrasi yang terjadi atas kebijakan yang berlandaskan hukum terkadang tidak menuntaskan konflik, bahkan dapat saja kembali menimbulkan konflik karena tidak semua unsur sosial merasa terpuaskan. Jadi kebijakan tidak selamanya menyelesaikan konflik tetapi justru dapat menyulut konflik baru. Tetapi yang diharapkan dengan kebijakan dapat menyelesaikan konflik dengan adanya integrasi sosial yang tepat.

4. Akibat Positif

Kebijakan sebagai cara untuk terjadinya integrasi dalam masalah konflik sosial, dilakukan oleh pemegang otoritas dalam sosial, hal ini tentu oleh aparat pemerintah dan penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum formal yang berlaku dalam suatu otoritas wilayah tertentu. Di Idonesia hukum formal menajdi acuan terhadap berbagai persoalan negara dalam masyarakat. Ketentuan hukum itu dibuat atas dasar kesepakatan oleh pihak-pihak yang diamanatkan untuk itu. Dalam hal ini hukum sifatnya umum yang tidak memandang segi-segi khusus dalam masyarakat, ia menyamakan semua orang tanpa pilih bulu. Karena itu hukum menjadi kaku dalam menyelesaikan konflik.

Kebijakan hukum terhadap konflik dapat menyelesaikan persoalan dengan cepat dan bersifat legal formal yakni dimana pengadilan dapat memutuskan persoalan berdasarkan pasal-pasal tertentu tanpa melihat kepada pihak-pihak yang berkonflik. Disaming itu pengambil kebijakan (hakim misalnya) tidak memiliki sens atau rasa melainkan menerapkan rasa hukum (kebijakan hukum) karena itu pengambil kebijakan tidak merasa terbebani akibat keputusan yang dilakukan, meski kebijakan itu dapat saja membuat orang “tidak merasa adil” dan menimbulkn konflik baru. Maksudnya Kebijakan itu melepaskan pengambil kebijan dari beban mental karena hukum telah memutuskannya.

Satu sisi kebijakan dapat saja menyelesaikan persoalan karena kebijakan telah memutuskan jika antara yang berkonflik didukung oleh kesadaran diri dan kebijakan itu dpat memenuhi rasa adil dalam masyarakat dan konflik dapat diselesaikan dengan baik.

5. Akibat Negatif

Kebijakan dapat saja berakibat negatif dimana kebijakan yang dilakukan terhadap konflik justru melahirkan konflik baru lagi. Hal ini penanganan kebijakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, meski telah terpenuhi rasa keadilan hukum. Atau masih ada sisi-sisi yang belum terpenuhi oleh kebijakan yang diambil menurut hukum, misalnya, aspek nilai dan tindakan telah terpenuhi tetapi secara faktual tidak dapat diterima oleh yang berkonflik atau salah satu dari yang berkonflik. Untuk itu kebijakan harus memenuhi semua unsur kebijakan, sehingga konflik dapat selesai dengan baik.

6. Peran Kebijakan

Peran kebijakan dalam menhelola konflik sosial sangat penting, dimana konflik cendrung tidak dapat terselesaikan dengan baik dan bahkan tidak tuntas dalam masyarakat. Penanganan konflik secara tradisional tidak mungkin lagi karena peran tokoh-tokoh tradsional telah termarjinalkan oleh hukum. Tumpulnya peranan tokoh-tokoh tradisional lebih disebabkan oleh *truss* (kepercayaan) masyarakat, tidak lagi ada, disamping tokoh-tokohnya telah hilang (khususnya tokoh-tokoh kharismatik yang dipatuhi). Kini kebijakan menjadi andalan untuk berbagai kasus sosial maupun individual dalam masyarakat, meskipun hasilnya tidak demikian sesuai engan harapan masyarakat, bahkan banayak kasus konflik yang diputuskan dengan kebijakan hukum justru melahirkan konflik baru yang lebih berat. Misalnya konflik dibidang harta warisan, kebijakan yang diambil memnangkan satu dari lainnya, tetapi kebijakan hukum yantelah diputuskan itu sama sekali tidak memuaskan yang kalah, yang kalah harus merelakan hartanya untuk yang menang, keputusan itu merupakan keterpaksaan bagi yang kalah, yang timbul adalah dendam, dan dendam itu berketurunan sampai anak cucu dan terus diingat. Peran kebijakan meski jalan satu satunya pada saat ini tetapi tidak dapat menyelesaikan perasaan yang berkonflik secara tuntas.

C. Otoritas

1. Pengertian

Pada dasarnya otoritas adalah; menurut Afif Muhammad, para pemimpin agama cenderung menginginkan anggota kelompoknya memiliki visi dan persepsi yang sama dengan membuat batasan-batasan untuk memastikan keseragaman. Dengan demikian anggota kelompok memiliki logika sendiri, yang seiring dengan pemimpinnya, dalam menginterpretasikan ajaran atau nilai agamanya.[11] Max Weber membagi tiga jenis otoritas atau dominasi yakni 1) *Otoritas hukum rasional*. Otoritas ini yang dimaksud adalah legimitasi hukum positif yang ditetapkan oleh negara atau yang memiliki otoritas, sering disebut undang-undang atau peraturan, 2) *Otoritas Tradisional*, yakni otoritas yang sudah biasa dan struktur sosial yang sudah lama ada, dan, 3) *Otoritas kharismatik* yakni otoritas karena kharisma individu atau pemimpin yang tidak harus pemimpin formal[12].

Otoritas sangat terkait dengan peran dari pemilik otoritas tersebut. Peran dapat didefinisikan secara umum sebagai harapan pada tindakan atau perilaku yang diharapkan dari kedudukan, fungsi atau posisi seseorang baik sebagai pimpinan ataupun anggota. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) *role perception*: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) *role expectation*: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah dapat terlaksana (Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

---

[11] Afif Muhammad, *Ibid*. Hal. 40

[12] George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, 2007, Kencana, Jakarta, Hal. 37-41

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan – (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.[13]

2. Pembagian Otoritas

Otoritas atau kewenangan atau kekuasaan secara definitif adalah; kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompoklain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Miriam Budiardjo,2002) yang terlihat dari defenisi ini adalah berupa kemampuan atau kekuatan yang lahir dari seseorang, dengan kemampuan itu mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan dari yang mempengaruhi itu. Berupa dorongan, support.

Max Weber membagi tiga jenis otoritas atau dominasi yakni 1) Otoritas hukum rasional. Otoritas ini yang dimaksud adalah legimitasi hukum positif yang ditetapkan oleh negara atau yang memiliki otoritas, sering disebut undang-undang atau peraturan, 2) Otoritas Tradisional, yakni otoritas yang sudah biasa dan struktur sosial yang sudah lama ada, dan, 3) Otoritas kharismatik yakni otoritas karena kharisma individu atau pemimpin yang tidak harus pemimpin formal[14].

---

[13] Kanfer, R (1987). Task - specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants. Journal of Social and Clinical Psychology, 5, 237-264.

[14] George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, 2007, Kencana, Jakarta, Hal. 37-41

3. Peran Otoritas

Peran otoritas secara sosial dapat mempengaruhi sikap tindakan atau pemikiran sosial sesuai dengan yang diinginkan pelaku otoritas. Masyarakat secagai objek otoritas tentu menjadi instrumen yang diperlakukan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemegang otoritas, tindakan yang diinginkan dan pemegang otoritas merupakan objek dan subjek.

Otoritas hukum rasional yang merupakan peraturan yang diundangkan secara formal merupakan otoritas yang dijalankan pemegang otoritas sesuai dengan aturan yang ditetapkan juga. Artinya pemegang otoritas tidak melampaui otoritasnya, dalam hal ini ada keterbatasan yang mengikat pemegang otoritas. Otoritas hukum rasional ini terbatas oleh hukum positif, Perannya dan kekuatannya yang bersifat formal tetap menjadi aturan hukum dalam membentuk sikap dan tindakan dalam sosial meskipun dlam keterbatasan. Otoritas sosial tradisional tumbuh dalam masyarakat, dari pengakuan dan kepatuhan sosial sebagai akibat dari ketokohan seseorang. Otoritas tradisional memiliki jangkauan yang luas bahkan bersifat emosional sosial, pengaruhnya dalam masyarakat sangat menentukan terhadap sikap dan tindakan masyarakat dan lebih dalam dari otoritas hukum formal. Sedang otoritas kharismatik, malah lebih jauh lagi dapat menimbuhkan kekutan untuk memaksa dengan emosional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.

Otoritas tradisionsl, terlebih lagi kharismatik kini sudah langka, cendrung sudah tidak ada lagi, sehingga masyarakat lebih memegang otoritas formal yang resmi dalam masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dipercaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi didalam masyarakat.

BAB II

PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Geokrafis

1. Letak dan kodisi geografis

Geografis Provinsi Sumatera Utara terletak pada 0° - 4°33' Lintang Utara dan 96°50' - 100°52' Bujur Timur, merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara berbatas sebelah utara dengan Provinsi Aceh, sebelah barat dengan Samudera Hindia, sebelah selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta sebelah timur dengan Selat Malaka. Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Provinsi Sumatea Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km. Panjang Garis Pantai Timur 545 Km, Panjang Garis Pantai Barat 375 Km dan Panjang Garis Pantai Pulau Nias 380 Km. Terdapat 419 pulau, dengan 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dalam kondisi baik seluas: 27.019,57 Ha dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki

potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya. Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi yaitu daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Banyak terdapat pulau-pulau kecil merupakan ciri yang dimiliki oleh kawasan pesisir barat Sumatera Utara. Pantai barat juga memiliki hamparan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

Sumatera Utara memiliki luas total sebesar 181.860,65 km^2 yang terdiri dari daratan seluas 72.981,23 km^2 atau 3.73 % dari luas wilayah Republik Indonesia dan luas perairan sebesar 110.000,65 km^2, sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera.

Perkembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara mengikuti dinamika kehidupan sosial ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2015, secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 436 Kecamatan dan 5.418 Desa/ Kelurahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 6.134,00 Km^2 (8,40%). Sedangkan luas terkecil adalah Kota Tebing Tiggi yaitu 31,00 km2 (0,04%). Data selengkapnya (*Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara)*

2. Curah hujan

Curah hujan relatif cukup tinggi yaitu berkisar 1.431 - 2.265 mm

per tahun atau rata-rata 2.100 mm per-tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 230 hari per tahun. Pada wilayah kering, curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 1.500 mm yang tercatat di beberapa bagian wilayah Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara, sedang curah hujan tinggi berkisar antara 2.000 sampai 4.500 mm berlangsung sepanjang tahun di daerah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Nias, Tapanuli Tengah, dan sebagian besar Tapanuli Selatan. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada Juni sampai September dan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai Maret.

3. *Suhu*

Ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 35,80oC, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian yang suhu minimalnya bisa mencapai 13,40o C. Sedang *kelembapan* udara rata-rata 78%-91%.

4. *Topografi*

a. Kemiringan Lahan

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari utara keselatan. Kemiringan tanah antara 0%–2% seluas 17,8% dari luas wilayah, 2%- 15 % seluas 49,2% dari luas wilayah, 15% – 25% seluas 8,8%, 25% – 40% seluas 10,8% dan diatas 40% seluas 11,3% dari luas wilayah, sedangkan luas wilayah perairan Danau Toba sekitar 112.986 Ha atau 1,6% dari luas wilayah

b. Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2200 m dpl. terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu bagian Timur dengan

keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 24.921,99 Km2 atau 34,77 persen dari luas wilayah Sumatera Utara adalah daerah yang subur, kelembaban tinggi dengan curah hujan relatif tinggi pula. Banjir juga sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi pula kekurangan persediaan air disebabkan kondisi hutan yang kritis. Wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km2 atau 65,23 persen dari luas wilayah Sumatera Utara, sebagian besar merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

c. *Geologi*

Secara geologis, *Struktur dan Karakteristik* wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi.

5. Sejarah Ringkas

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang

pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

a. Tonggak Sejarah.

1854 Gouvernement van Sumatra, ibukotanya di Medan 1948 Berdiri Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan.

1949 Dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/ Sumatera Timur 1950 Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur digabungkan kembali sebagai Provinsi Sumatera Utara.

1956 Berdiri Provinsi Aceh, dengan wilayahnya sebahagian dari Provinsi Sumatera Utara.

B. Demokrafis

1. *Kondisi Penduduk*

Berdasarkan hasil pendataan Penduduk Tahun 2015, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara mencapai 13.937.797 orang, yang terdiri atas 6.954.552 laki-laki dan 6.983.245 perempuan, dengan kepadatan rata-rata 186 Jiwa/Km^2. Sekitar 51,83 % penduduk bertempat tinggal di pedesaan dan 49,17 % bertempat tinggal di daerah perkotaan, angka ini jauh berbeda dengan kondisi tahun 2014 dimana penduduk yang tinggal di Desa mencapai 50,74% dan di perkotaan sebesar 49,26%, dan diperkirakan bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk perkotaan akan sedikit lebih banyak dari perdesaan. Jumlah penduduk Sumatera Utara merupakan terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah atau terbesar di luar Pulau Jawa. Terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni Suku Melayu Deli di Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat, Suku Batak Karo berada di Kabupaten Karo, Suku Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Suku Batak Pesisir berada di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Suku Batak Mandailing/Angkola di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, Suku Batak Simalungun umumnya di Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak berada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat dan Suku Nias di Kepulauan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau : Kota Medan, Pesisir barat, Suku Aceh umumnya di Kota Medan, Suku Jawa di Pesisir Timur & Barat dan etnis Tionghoa umumnya di wilayah perkotaan pesisir Timur & Barat.

Estimasi Jumlah Penduduk Sumatera Utara Periode Tahun 1980–2035 Dalam kurun waktu 30 tahun (1980-2010) jumlah penduduk Sumatera Utara meningkat 4,6 juta dan dan diproyeksikan meningkat sebanyak 3,09 juta dalam kurun waktu 25 tahun kedepan. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan daerah termasuk dalam menjamin ketersediaan pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar lainnya.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 99,59, yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio terbesar terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebesar 102,16 dan yang terkecil terdapat di Kabupaten Nias Barat yakni sebesar 91,65. 2.1.4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Dari data Proyeksi Penduduk Tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 2015 sebesar 1,20 persen dan pada periode 2000-2010 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,22%, merupakan laju pertumbuhan penduduk terendah di Sumatera,atau posisi ke-5 laju pertumbuhan penduduk terendah secara nasional (dibawah laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah (0,37%), Jawa Timur (0,76%), Kalimantan Barat (0,91%), dan D.I Jogyakarta (1,02%).

Secara geografis, penyebaran penduduk terbesar masih terkonsentrasi pada wilayah Pantai Timur, yaitu dimana pada wilayah tersebut terdapat sejumlah kabupaten yang berpenghuni terbesar (di atas 5 % dari seluruh penduduk provinsi) dan berkepadatan tertinggi (di atas 200 jiwa/km2), seperti : Labuhan Batu, Asahan, Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai. Pada wilayah timur ini juga terdapat sejumlah besar kota besar dengan distribusidan kepadatan penduduk terbesar yaitu Kota Medan, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai dan Padang Sidempuan. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 terlihat bahwa penyebaran penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/ kota rata-rata dibawah 5 persen, dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen. Secara umum kepadatan bruto di Provinsi Sumatera Utara masih rendah karena sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan yang tidak terbangun, yaitu kawasan hutan dan perkebunan. Kecuali pada kota-kota yang ada di Sumatera Utara, kepadatannya relatif sedang sebagai kawasan perkotaan. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah tiga kabupaten/ kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2,210.624 orang (15,86%), 2.029.308 orang (14,56%), dan 1.013.385 orang (7,27%). Sedangkan Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yang berjumlah 45.516 orang (0,33 persen). Dengan luas wilayah

Provinsi Sumatera Utara sekitar 72.981,23 kilometer persegi yang didiami oleh 13,937.797,401 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 184 orang per kilo meter persegi. Menurut hasil pendataan penduduk terakhir tahun 2015, Kabupaten/kota yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak 8.341 orang per kilo meter persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 37,36 orang per kilo meter persegi.Kota kedua dengan kepadatan tertinggi adalah Kota Tebing Tinggi sebesar 4.445 per kilometer persegi. Dengan kemampuan daya dukung II-18 lahan Kota Tebing Tinggi yang terbatas sementara penduduk terus bertambah, Kota Tebing Tinggi perlu mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Tabel 2.6 Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Penduduk Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Kedekatan terhadap Kota Medan dan berkedudukan di wilayah timur menjadikan suatu kabupaten memiliki penduduk perkotaan yang semakin besar, seperti kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai berpenduduk perkotaan yang dominan, diikuti Kabupaten Asahan, Batu Bara, Simalungun, Karo dan Langkat. Sebaliknya kabupaten-kabupaten yang jauh dari Medan memiliki penduduk yang sangat didominasi penduduk perdesaan, seperti Kabupaten Nias Selatan, Nias, Humbang Hasundutan dan Tapanuli Selatan. 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Aspek kesejahteraan masyarakat berdasarkan fokus kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari angka nilai PDRB, konstribusi PDRB, pertumbuhan PDRB, Inflasi, PDRB perkapita, disparitas pendapatan masyarakat dan persentase penduduk yang berada diatas garis kemiskinan. Secara umum dapat diungkapkan

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun terakhir, terlihat semakin mengalami fluktuatif dengan trend penurunan, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai Sumatera Utara terjadi pada tahun 2011 dimana laju pertumbuhannya mencapai 6,66 persen, akan tetapi setelah tahun 2011 terjadi trend penurunan dan puncaknya di tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017.

Tahun 2015 dengan laju pertumbuhan dibawah angka psikologis 6 persen tepatnya di angka 5,10 persen, adapun penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 ini, sebagai dampak pelemahan perekonomian dunia dimana Nasional juga turun dan di bawah capaian Sumatera Utara pada angka 4,79 persen, selain pengaruh global juga sebagai dampak dari berbagai persoalan internal yang masih belum teratasi seperti kondisi infrastruktur baik darat, laut maupun udara dan juga proses perizinan dan ketersediaan ketenagalistrikan dan gas yang menjadi salah satu faktor pendorong tumbuhnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan NasionalTahun 2010-2015 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, secara rata-rata per lima tahunan juga lebih baik dimana Sumatera Utara dalam kurun waktu enam tahun rata-rata tumbuh 5,98 persen dan nasional hanya 5,76 persen. Secara umum kondisi enam tahunan Sumatera Utara tahun 2010-2015 Sumatera Utara terjadi penurunan angka pertumbuhan dimana angka psikologis 6 persenan tidak dapat diraih kembali, kondisi ini hamper sama dengan capaian nasional hanya bertengger di angka 5 persenan. Jika melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara lima tahun terakhir berdasarkan ADHK Tahun 2010-2014 laju pertumbuhan ekonomi Sumut Tahun 2015 (Triwulan IV) adalah sebesar 5,10 persen, lebih rendah dari capaian tahun 2014 yang berhasilmencapai 5,23 persen. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan produktifitas gerak ekonomi Provinsi Sumatera Utara, yang dapat berimbas pada penurunan Pendapatan Daerah. Jika dilihat pada kondisi perekonomian daerah Sumatera Utara tahun 2015 pertumbuhan kategorial tertinggi diperoleh dari lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,85 persen disusul oleh lapangan usaha administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan jaminan social wajib sebesar 8,14 persen, adapun pemberi laju pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 2,13 persen disusul oleh Lapangan Usaha Perambangan dan Penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 3,58 persen. Dari kondisi di atas dapat diperoleh gambaran bahwa beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan meningkat akan tetapi terdapat beberapa yang mengalami pertumbuhan sedikit menurun, ada indikasi awal

bahwa penurunan ini dapat berimbas dari pasokan energy yang belum optimal terpenuhi di Sumatera Utara seperti pasokan listrik dan gas. 2.2.1.2 Struktur PDRB Adapun terkait dengan konstribusi sektoral/ lapangan usaha PDRB Sumatera Utara akan disajikan dalam bentuk PDRB atas Dasar Harga Berlaku dari periode Tahun 2011. Peringkat pertama penyumbang PDRB Sumatera Utara adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan konstribusi sebesar 22,01 persen (Triwulan IV 2015), dan hal ini jauh menurun bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang menyumbang sebesar 23,18 persen. Demikian pula dengan Industri pengolahan menempati urutan kedua dalam hal konstribusi PDRB Sumatera Utara dimana tahun 2015 pada triuwlan IV kembali Industri pengolahan memberikan sumbangan di angka psikologis 20,21 persen, naik bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 yang hanya memberikan sumbangan sebesar 19,90 persen, peringkat ketiga juga mengalami pertambahan angka konstribusi yakni lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan konstribusi sebsar 17,43 persen, meningkat bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya memberikan sumbangan sebesar 17,17 persen. Sementara lapangan usaha lainnya yang mengalami penurunan sumbangan antara lain di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang turun dari 23,27 persen ditahun 2014 menjadi hanya 22,01 persen di tahun 2015. Demikian pula dengan informasi dan komunikasi dari 1,97 persen di tahun 2014 menjadi hanya 1,95 persen di tahun 2015 Sama seperti struktur PDRB ADHB, maka untuk PDRB ADHK hampir sama struktur ADHB, yakni sumbangan terbesar diperoleh dari Lapangan Usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan sumbangan sebesar 24,97 persen pada tahun 2015, meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebesar 24,85 persen, disusul oleh lapangan usaha industry pengolahan yang mengalami penurunan dari 19,79 persen pada tahun 2014 menjadi 19, 50 persen pada tahun 2015.

Sebagai Provinsi terbesar di luar pulau Jawa, ditilik dari besaran jumlah penduduk dan jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota, maka secara umum besaran PDRB Sumatera Utara belumlah menunjukkan angka yang terbesar di Indonesia, masih merupakan peringkat 7 *(Sumber:*

BPS RI) kedudukan Provinsi Sumatera Utara dalam konstelasi sumbangan PDB adalah pada peringkat 7, sementara untuk tingkat regional Pulau Sumatera menduduki peringkat dua, sementara untuk Provinsi di luar Pulau Jawa menduduki peringkat ketiga setelah Riau dan Kalimantan Timur. Adapun untuk kondisi Provinsi Sumatera Utara Nilai Nominal PDRB Sumatera Utara dengan metode perhitungan SNA 2008 dan tahun dasar 2010 *(Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara.*

Pertumbuhan PDRB ADHB Sumateran Utara dari tahun 2011 ke tahun 2015 meningkat sebesar 51,64 persen, atau secara rata-rata sebesar 10,33 persen/tahun. pertumbuhan PDRB ADHK dengan Tahun Dasar 2010 dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebesar 24,96 atau rata-rata per tahun sebesar 4,97 persen.

Tingkat inflasi di Sumatera Utara secara umum juga kondisinya lebih baik dari nasional, akan tetapi pada tahun 2015 kondisi inflasi Sumatera Utara lebih baik dari capaian nasional, dimana inflasi di Sumatera Utara mencapai 3,24%. Secara Makro Rata-Rata Inflasi Sumatera Utara selama periode 2011-2015 sebesar 5,82% berada diatas rata-rata Inflasi Nasional pada periode yang sama sebesar 5,65% (nasional lebih baik). *Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara*

Kondisi pendapatan perkapita masyarakat Sumatera Utara tahun ke tahun menunjukkan perbaikan, hal ini tentunya merupakan pertanda terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dapat dilihat dari tahun 2011 PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.28,77 Juta dan pada tahun 2015 menjadi Rp. 41,02 Juta. Tetapi jika dikonversikan ke dalam Dollar Amerika mengalami penurunan dari US $ 3.315 di tahun 2012 menjadi US $ 3.066 pada tahun 2015. Hal ini terjadi dikarenakan melemahnya harga tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Disparitas Pendapatan Masyarakat Ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam tahapan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat terjadi karena perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu sehingga mengurangi pemerataan modal, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah.

2. Persentase Penduduk Miskin

Seiring dengan kondisi nasional, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mencapai 1,5 juta jiwa atau 10,8% dari total penduduk. Jumlah ini meningkat secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya mencapai 1,4 juta jiwa atau 9,9% dari total penduduk.

Dalam waktu 6 bulan, jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami peningkatan 44.000 jiwa penduduk miskin. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi terkait menurunnya tingkat pendapatan meski daya beli relatif terjaga.

Secara spasial, Sumut masuk ke dalam 5 besar provinsi dengan penambahan persentase penduduk miskin terbesar di Indonesia, bersama dengan Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Secara nasional, Sumatera Utara masih menduduki peringkat 17 nasional berasarkan urutan jumlah persentase penduduk miskin terbesar. Tingkat kemiskinan yang semakin melebar ini tidak lepas dari karakteristik Sumatera Utara yang memang sangat menggantungkan aktivitas ekonominya pada perkebunan. Tahun 2015 memang memberikan pukulan yang cukup berat akibat perkembangan harga dan permintaan yang kurang menggembirakan.

Selama periode September 2014 s.d. September 2015, persentase kemiskinan meningkat tajam di pedesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan di Sumatera Utara bertambah 87.280 orang menjadi 11,06% dari total penduduk desa. Sementara itu, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 60.290 orang menjadi 10,51% dari total penduduk kota (Grafik 5.8). Secara historis, persentase penduduk miskin di desa memang selalu lebih tinggi dibandingkan di kota. Meskipun telah mengalami penurunan yang signifikan sejak beberapa tahun terakhir, namun tingkat kemiskinan di desa kembali meningkat signifikan pada September 2015, sebagaimana digambarkan pada grafik sebagai berikut:

Grafik Indeks Kedalaman & Keparahan Kemiskinan di Sumatera Utara. Meningkatnya kemiskinan di pedesaan diduga karena daya beli

masyarakat desa yang masih terbatas. Hal tersebut tercermin dari Nilai Tukar Petani yang masih berada di bawah 10020, jauh lebih rendah bila dibandingkan tahun 2014.

Terjadi baik untuk tanaman pangan, perkebunan, maupun hortikultura. Hal tersebut terutama dipengaruhi normalisasi harga komoditas yang berjalan lambat.

Adapun jika dibandingkan dengan Nasional, maka capaian pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara terlihat lebih baik, hal ini terjadi sejak tahun 2011 dimana disparitas persentase penduduk miskin antara Sumatera Utara dan Nasional sebesar 1,53 persen, akan tetapi disparitas ini semakin kecil bahkan di tahun 2015 hanya sebesar 0,69 persen, tentunya ini menjadi salah satu perhatian khusus, sebab terdapat beberapa Provinsi di Indonesia yang secara lebih cepat mengurangi persentase penduduk miskinnya di banding upaya Provinsi Sumatera Utara.

3. Kehidupan agama dan sosial

Sumatera Utara yang dianggap sebagai serambi Mekkah, pendudunya sangat religius, kehidupan agama sangat terasa dalam masyarakat. Di Sumatera Utara terdapat enam agama resmi sebagaimana agama-agama yang diakui negara; Islam, Kristen Khatoik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan konghucu. Mayoritas penduduk Sumara Utara beraga Islam, karena itu Islam manjadi sentrum kehidupan keagamaan dan sosial yang terlihat dalam berbagai segmen kehidupan masyarakat, disamping itu Islam sebagai agama mayoritas memiliki peranan sosial dan kultural, meningkatkan berbagai kehidupan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, budaya, seni dan kehidupan sosial menyangkut tata nilai, etika dan prilaku; adab dan sopan santun dalam masyarakat.

Kehidpan agama dalam masyarakat Sumatera Utara terlihat sebagai salah satu pilar yang menjadi prioritas dalam pembangunan hal ini terlihat dalam pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yakni sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.

Posisi pemerintah dalam memandang persoalan agama adalah sebagai pemandu dalam proses sosialisasi, dimana agama menjai bahagian dari kehidupan sosial yang secara internal adalah persoalan agama dan sosial itu sendiri. Oleh karena agama merupakan hak dasar dari kebutuhan individu dan masyarakat maka pemerintah tidak mencampuri persoalan agama dan diserahkan kepada pemeluknya masing-masing untuk mengurusi sendiri. Pemerintah sendiri hanya melakukan pengawasan, perlindungan dan pemeliharaan yang intinya dalam ragka meningkatkan kehidupan beragama, maka peran pemerintah menyediakan fsilitas berupa keamanan dan perlindungan terhadap pelaksanaan kehiduan agama tanpa membeda-bedakan satu agama dengan lainnya.

4. Konstruksi budaya

Budaya sebagai hasil dari cita, rasa dan karsa yang merupakan produk dari hidup masyarakat dengan lingkungannya, akan selalu memberi ciri terhadap ucapan, sikap, tindakan dan pemikiran dari pemangku budaya yang bersangkutan. Sumatera Utara menjadi rumah bagi warganya, dan menjadi inspirasi yang menghasilkan bentuk kerangka dalam kehidupan masyarakat dan menjadi konstruksi dalam budayanya.

Konstruksi budaya masyarakat di Sumatera Utara terlihat dari beberapa karakter masyarakat antara lain. Pertama, memiliki sikap dasar yang terbuka, berterus terang dengan sikap yang tegas. Sehingga terkesan keras, tetapi sebenarnya sikap terbuka itu memiliki nilai yang sangat luhur, santun dan menghormati. Keras bukan berarti brutal atau kasar, melainkan perwujudan rasa hormat dan kepeduliannya terhadap orang lain. Pada kesan pertama melihat orang Sumatera Utara terkesan demikian galak dan agresif, terapi selanjutnya terlihat suasana batin yang luhur, jujur dan tulus, sikap ini mengasilkan keterbukaan dan bertanggung jawab. Karakter yang demikian banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat, etnis dan suasana lingkungan yang bebas

tidak memiliki ketertekanan. Seperti pada etnis toba, Mandailing, karo, simalungun dan lainnya.

5. Etnisitas

Penduduk Sumatera Utara terdiri dari berbagai suku, yaitu suku asli yang terdiri dari 8 suku yakni Suku Melayu Deli di Pesisir Timur, terutama di kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Langkat, Suku Batak Karo berada di Kabupaten Karo, Suku Batak Toba di wilayah Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Suku Batak Pesisir berada di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Suku Batak Mandailing/ Angkola di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Mandailing Natal, Suku Batak Simalungun umumnya di Kabupaten Simalungun, Suku Batak Pakpak berada di Kabupaten Dairi dan Pakpak Barat dan Suku Nias di Kepulauan Nias. Selain itu terdapat suku pendatang yakni Suku Minangkabau : Kota Medan, Pesisir barat, Suku Aceh umumnya di Kota Medan, Suku Jawa di Pesisir Timur & Barat dan etnis Tionghoa umumnya di wilayah perkotaan pesisir Timur & Barat. Keberadaan etnis dn suku di Sumatera Utara merupakan kekayaan daerah dari sudut keragaman etnis, sepanjang etnis-etnis ini dapat melakukan konsolidasi dan komunikasi yang baik akan menimbulkan keahrmonian. Tetapi jika komunikasi dan konsoldasi sosial lemah yang didukung oleh pihak otoritas yang lemah dapat menjadi bom yang segera meledak dan menjadi ketidak harmonisan. Keragaman suku bangsa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat Sumut terdiri dari berbagai kelompok suku yang terkategorikan dalam dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok suku asli dan kelomppok pendatang. Melayu, Batak, dan berbagai sub-etnisnya, serta Nias, merupakan suku asli, sedangkan kelompok suku pendatang, antara lain Jawa, Minang, Tionghoa, Aceh, dan India. Yang menarik, keragaman suku bangsa semacam ini diikuti pula oleh agama yang dianut maupun sebaran wilayah permukiman mereka. Oleh karena itu, kantong-kantong permukiman di bagian terbesar wilayah Sumut sekaligus merupakan kantong-kantong suku dan agama. Posisi kota, khusunya Medan sebagai ibu kota provinsi, menjadi wilayah pertemuan, yang menjadi simbol

keragaman provinsi ini. Catatan kependudukan menunjukkan, bagian terbesar penduduk Sumut memeluk agama Islam (mencapai 65 persen). Agama ini terutama dianut oleh kelompok suku Melayu dan Jawa yang menyebar di pesisir timur Sumatera, meliputi daerah Asahan, Simalungun, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Tanjung Balai, Binjai, Tebing Tinggi, dan Labuhan Batu. Di samping itu, bagian barat dan selatan Sumut, meliputi wilayah Sibolga, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Padang Sidimpuan, yang dimukimi kelompok suku Mandailing pun, mayoritas beragama Islam. Akan halnya agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, dengan proporsi total sebanyak 26,6 persen, dianut oleh suku Batak dengan berbagai kelompok subetnisnya yang tersebar di bagian tengah [1]Sumut, Pegunungan Bukit Barisan, yang meliputi wilayah Tapanuli Utara, Karo, Dairi, Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Pematang Siantar , dan Tapanuli Tengah. Di samping itu, Kristen juga menjadi Agama terbesar yang dianut masyarakat Nias yang bermukim di Pulau Nias, sebelah barat Pulau Suma

C. Kearifan lokal

Kearifan lokal (*local wiahdoum*) terdapat pada setiap masyarakat secara khusus maupun umum yang menunjukkan kesamaan dalam tradisi kebudayaan, hal ini bergantung kuat dengan alam-lingkungannya, diantara pembentuk kearifan lokal itu selain dari masyarakatnya, alam lingkungannya, juga agama dan keyakinannya. Oleh karena itu kearifan lokal banyak dinspirasikan dari ketiga unsur ini. Misalnya untuk menunjukkan kerja sama seperti yang diungkapkan orang Nias, *Noronga' uchu gawoni, naro' uchu geo, alisi tafa daya-daya, hulu ta farwalo-walo:* Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, orang bali mengatakan, *Segilik, seguluk, selunglung sebayantaka*,: susah maupun senang kita harus bersama-sama. Orang Mandailing mengatakan; *Salumpat saindege, samo-samo tuginjang , samo-samo tutoru, muda malamun saulak lalu, muda madabu*

[1] http://biz kompas com/read/2009/02/09/0923333/perburuan suara dikantongsuku dan agama

samo-samo margulu: Sama-sama keatas, sama-sama kebawah, kalau masak sekali jalan, kalau jatuh sama-sama berselemak.

Kearifan menyangkut dengan hal-hal tradisi-budaya yang telah beruratberakar dalam suatu masyarakat, Tradisi sebagai perwujudan dari pikiran, perasaan dengan sejumlah tindakan-tindakan sosial yang tersistim (teratur), memiliki tatacara dan aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi terlaksana dalam masyarakat sebagai tata-tertib, atau berupa nasehat dan bimbingan dalam kehidupan yang telah dilaksanakan sejak zaman dahulu atau sejumlah larangan (*tabu*) yang tidak boleh dilanggar, karena akan menemukan kesukaran bahkan kecelakaan dalam kehidupan, ada juga tanda-tanda atau petunjuk dari alam yang dapat ditangkap oleh orang-orang khusus (ulama, kiyai, *datu atau dukun*) Dan adalagi yang berupa kata-kata bijak bersifat filosofis (*wishdoum*) sebagai perwujudan dari keseluruhan dari karakter suatu masyarakat dalam rangka merespos realitas kehidupan, yang terahir ini selalu diucapkan dalam merespons berbagai keadaan dalam masyarakat, untuk menunjukkan bahwa masyarakat itu memiliki karakter yang telah ada yang boleh jadi untuk menunjukkan kaunggulannya atau bahwa masyarakat ini berbeda dari masyarakat itu, atau hal-hal yang datang kemudian tidak sesuai dengan tradisi yang ada, atau untuk mendorong semangat dan keinginan yang besar untuk mencapau tujuan.

Masyarakat Sumatera Utara memiliki kearifan lokal yang direfresentasikan dengan ungkapan-ungkapan bahasa yang bernilai tinggi (*verbal*), Sikap maupun tindakan-tindakan sosial. Ungkapan-ungkapan itu sebagai berikut; Orang Toba (batak) dengan ungkapan dalam etika dalam keluarga, *Hormat marmora, manat mardongan sabutuha, asa elek marboru.* Ungkapan ini di laksanakan dalam berbagai acara baik perkawinan, keselamatan, maupun dalam melaksanakan acara-acara dalam keluarga dan masyarakat. Hormat Marmora; hormat kepada keluarga pihak mempelai perempuan, sebagai mora. *Inda tola jais Marmora;* tidak boleh menganggap enteng kepada mora, kata orang mandailing. *Manat mardongan sabutuha*; hati-hati, teliti dengan seksama menghadapi keluarga sendiri (seketurunan dari pihak ayah) mengormati dan mengajaknya bermusyawarah dalam memutuskan persoalan-persoalan keluarga. *Elek maranakboru,* sifat

mora kepada keluarga anak borunya harus mengambil hati, menyenangkan jiwanya, membesarka jiwanya, menolong dan memberikan fasilitasnya, untuk mengambil hatinya, karena dalam tradisi orang Toba, Mandailing, Karo, Fak-Fak, Dairi dan lainnya, seperti Angkola, Sipirok dan Padanglawas, anak boru dalam sistim kekerabatan memiliki peran besar dalam semua acara-acara *moranya*. Karena itu *mora* harus *elek* (mengambil hatinya). Dalam peselisihan, ada yang disebut *Alangbatang*; syarat perdamaian. Dalam perdamaian, dilaksanakan dengan memotong kerbau, makan bersama dengan *markobar*; bermusyawarah.

BAB III

SITUASI DAN KONFLIK DI SUMATERA UTARA

A. Kota Medan

1. Sejarah

Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera. Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular.

Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut. Secara keseluruhan jenis tanah di wilayah Deli terdiri dari tanah liat, tanah pasir, tanah campuran, tanah hitam, tanah coklat dan tanah merah. Hal ini merupakan penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui

jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkwalitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada zaman itu adalah Deli Klei.

Mengenai curah hujan di Tanah Deli digolongkan dua macam yakni : Maksima Utama dan Maksima Tambahan. Maksima Utama terjadi pada bulan-bulan Oktober s/d bulan Desember sedang Maksima Tambahan antara bulan Januari s/d September. Secara rinci curah hujan di Medan rata-rata 2000 pertahun dengan intensitas rata-rata 4,4 mm/jam.

Menurut Volker pada tahun 1860 Medan masih merupakan hutan rimba dan disana sini terutama dimuara-muara sungai diselingi pemukiman-pemukiman penduduk yang berasal dari Karo dan semenanjung Malaya. Pada tahun 1863 orang-orang Belanda mulai membuka kebun Tembakau di Deli yang sempat menjadi primadona Tanah Deli. Sejak itu perekonomian terus berkembang sehingga Medan menjadi Kota pusat pemerintahan dan perekonomian di Sumatera Utara.

a. Kampung Medan dan Tembakau Deli

Pada awal perkembangannya merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura, tidak jauh dari jalan Putri Hijau sekarang. Kedua sungai tersebut pada zaman dahulu merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang cukup ramai, sehingga dengan demikian Kampung "Medan Putri" yang merupakan cikal bakal Kota Medan, cepat berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat penting. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan ke kampung ini dan isteri Guru Patimpus yang mendirikan kampung Medan melahirkan anaknya yang pertama seorang laki-laki dan dinamai si Kolok. Mata pencarian orang di Kampung Medan yang mereka namai dengan si Sepuluh dua Kuta adalah bertani menanam lada. Tidak lama kemudian lahirlah anak kedua Guru Patimpus dan anak inipun laki-laki dinamai si Kecik.

Pada zamannya Guru Patimpus merupakan tergolong orang yang berfikiran maju. Hal ini terbukti dengan menyuruh anaknya berguru (menuntut ilmu) membaca Alqur'an kepada Datuk Kota Bangun dan kemudian memperdalam tentang agama Islam ke Aceh. Keterangan yang menguatkan bahwa adanya Kampung Medan ini adalah keterangan H. Muhammad Said yang mengutip melalui buku Deli In Woord en Beeld ditulis oleh N.Ten Cate. Keterangan tersebut mengatakan bahwa dahulu kala Kampung Medan ini merupakan Benteng dan sisanya masih ada terdiri dari dinding dua lapis berbentuk bundaran yang terdapat dipertemuan antara dua sungai yakni Sungai Deli dan sungai Babura. Rumah Administrateur terletak diseberang sungai dari kampung Medan. Kalau kita lihat bahwa letak dari Kampung Medan ini adalah di Wisma Benteng sekarang dan rumah Administrateur tersebut adalah kantor PTP IX Tembakau Deli yang sekarang ini. Sekitar tahun 1612 setelah dua dasa warsa berdiri Kampung Medan, Sultan Iskandar Muda yang berkuasa di Aceh mengirim Panglimanya bernama Gocah Pahlawan yang bergelar Laksamana Kuda Bintan untuk menjadi pemimpin yang mewakili kerajaan Aceh di Tanah Deli. Gocah Pahlawan membuka negeri baru di Sungai Lalang, Percut. Selaku Wali dan Wakil Sultan Aceh serta dengan memanfaatkan kebesaran imperium Aceh, Gocah Pahlawan berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga meliputi Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Medan Deli sekarang. Dia juga mendirikan kampung-kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Kota Jawa, Kota Rengas Percut dan Sigara-gara. Dengan tampilnya Gocah pahlawan mulailah berkembang Kerajaan Deli dan tahun 1632 Gocah Pahlawan kawin dengan putri Datuk Sunggal. Setelah terjadi perkawinan ini raja-raja di Kampung Medan menyerah pada Gocah Pahlawan. Gocah Pahlawan wafat pada tahun 1653 dan digantikan oleh puteranya Tuanku Panglima Perunggit, yang kemudian memproklamirkan kemerdekaan Kesultanan Deli dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669, dengan ibukotanya di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan. Jhon Anderson seorang Inggris melakukan kunjungan ke Kampung Medan tahun 1823 dan mencatat dalam bukunya *Mission to the East Coast of Sumatera* bahwa penduduk Kampung Medan pada waktu itu masih berjumlah 200 orang tapi dia hanya melihat penduduk yang

berdiam dipertemuan antara dua sungai tersebut. Anderson menyebutkan dalam bukunya "*Mission to the East Coast of Sumatera*" (terbitan Eidinburg 1826) bahwa sepanjang sungai Deli hingga ke dinding tembok mesjid Kampung Medan di bangun dengan batu-batu granit berbentuk bujur sangkar. Batu-batu ini diambil dari sebuah Candi Hindu Kuno di Jawa. Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada Nienhuys Van der Falk dan Elliot dari Firma Van Keeuwen en Mainz & Co, tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha) secara erfpacht 20 tahun di Tanjung Sepassi, dekat Labuhan. Contoh tembakau deli. Maret 1864, contoh hasil panen dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu. Kemudian di tahun 1866, Jannsen, P.W. Clemen, Cremer dan Nienhuys mendirikan de Deli Maatscapij di Labuhan. Kemudian melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah sangat luas dan berkembang, Nienhuys memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

b. Legenda Kota Medan

Menurut legenda di zaman dahulu kala pernah hidup di Kesultanan Deli lama kira-kira 10 Km dari Kampung Medan yakni di Deli Tua sekarang seorang Putri yang sangat cantik dan karena kecantikannya diberi nama Putri Hijau. Kecantikan Putri ini tersohor kemana-mana mulai dari Aceh sampai ke ujung Utara Pulau Jawa. Sultan Aceh jatuh cinta pada Putri itu dan melamarnya untuk dijadikan permaisurinya. Lamaran Sultan Aceh itu ditolak oleh saudara kedua laki-laki Putri Hijau. Sultan aceh sangat marah karena penolakan itu dianggapnya sebagai penghinaan

terhadap dirinya. Maka pecahlah perang antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Deli. Menurut legenda yang tersebut diatas, dengan menggunakan kekuatan gaib seorang dari saudara Putri hijau menjelma menjadi seekor ular naga dan seorang lagi menjadi sepucuk meriam yang tidak henti-hentinya menembaki tentara Aceh hingga akhir hayatnya. lama mengalami kekalahan dalam peperangan itu dan karena kecewa Putra Mahkota yang menjelma menjadi meriam itu meledak sebagian, bagian belakangnya terlontar ke Labuhan Deli dan bagian depannya kedataran tinggi Karo kira-kira 5 Km dari Kabanjahe. Putri Hijau ditawan dan dimasukkan dalam sebuah peti kaca yang dimuat kedalam kapal untuk seterusnya dibawa ke Aceh. Ketika kapal sampai di Ujung Jambo Aye, Putri Hijau mohon diadakan satu upacara untuknya sebelum peti diturunkan dari kapal. Atas permintaannya, harus diserahkan padanya sejumlah beras dan beribu-ribu telur dan permohonan tuan Putri dikabulkan. Tetapi baru saja uapacara dimulai tiba-tiba berhembuslah angin ribut yang maha dahsyat disusul gelombang-gelombang yang sangat tinggi. Dari dalam laut muncullah abangnya yang telah menjelma menjadi ular naga itu dan dengan menggunakan rahangnya yang besar itu diambilnya peti tempat adiknya dikurung, lalu dibawanya masuk ke dalam laut. Legenda ini samapai sekarang masih terkenal di kalangan masyarakat Deli dan malahan juga dalam masyarakat Melayu di Malaysia. Di Deli Tua masih terdapat reruntuhan Benteng dan Puri yang berasal dari zaman Putri Hijau, sedang sisa meriam penjelmaan abang Putri Hijau itu dapat dilihat di halaman Istana Maimun Medan.

c. Penjajahan Belanda di Tanah Deli

Belanda yang menjajah Nusantara kurang lebih setengah abad namun untuk menguasai Tanah Deli mereka sangat banyak mengalami tantangan yang tidak sedikit. Mereka mengalami perang di Jawa dengan pangeran Diponegoro sekitar tahun 1825-1830. Belanda sangat banyak mengalami kerugian sedangkan untuk menguasai Sumatera, Belanda juga berperang melawan Aceh, Minangkabau, dan Sisingamangaraja di daerah Tapanuli. Jadi untuk menguasai Tanah Deli Belanda hanya kurang lebih 78 tahun mulai dari tahun 1864 sampai 1942. Setelah perang

Jawa berakhir barulah Gubernur Jenderal Belanda J.Van den Bosch mengerahkan pasukannya ke Sumatera dan dia memperkirakan untuk menguasai Sumatera secara keseluruhan diperlukan waktu 25 tahun. Penaklukan Belanda atas Sumatera ini terhenti ditengah jalan karena Menteri Jajahan Belanda waktu itu J.C.Baud menyuruh mundur pasukan Belanda di Sumatera walaupun mereka telah mengalahkan Minangkabau yang dikenal dengan nama perang Paderi (1821-1837). Sultan Ismail yang berkuasa di Riau secara tiba-tiba diserang oleh gerombolan Inggeris dengan pimpinannya bernama Adam Wilson. Berhubung pada waktu itu kekuatannya terbatas maka Sultan Ismail meminta perlindungan pada Belanda. Sejak saat itu terbukalah kesempatan bagi Belanda untuk menguasai Kerajaan Siak Sri Indrapura yang rajanya adalah Sultan Ismail. Pada tanggal 1 Februari 1858 Belanda mendesak Sultan Ismail untuk menandatangani perjanjian agar daerah taklukan kerajaan Siak Sri Indrapura termasuk Deli, Langkat dan Serdang di Sumatera Timur masuk kekuasaan Belanda. Karena daerah Deli telah masuk kekuasaan Belanda otomatislah Kampung Medan menjadi jajahan Belanda, tapi kehadiran Belanda belum secara fisik menguasai Tanah Deli. Pada tahun 1858 juga Elisa Netscher diangkat menjadi Residen Wilayah Riau dan sejak itu pula dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di kerajaan Siak. Tujuan Netscher itu adalah dengan duduknya dia sebagai pembela Sultan Ismail secara politis tentunya akan mudah bagi Netscher menguasai daerah taklukan kerajaan Siak yakni Deli yang di dalamnya termasuk Kampung Medan Putri. Perkembangan Medan Putri menjadi pusat perdagangan telah mendorongnya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, Ibukota Asisten Residen Deli dipindahkan dari Labuhan ke Medan, 1 Maret 1887,Ibukota Residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis ke Medan, Istana Kesultanan Deli yang semula berada di Kampung Bahari (Labuhan) juga pindah dengan selesainya pembangunan Istana Maimoon pada tanggal 18 Mei 1891, dan dengan demikian Ibukota Deli telah resmi pindah ke Medan.

Pada tahun 1915 Residensi Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi Gubernemen. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja) dengan Walikota Baron Daniel Mac Kay. Berdasarkan

"Acte van Schenking" (Akte Hibah) Nomor 97 Notaris J.M. de-Hondt Junior, tanggal 30 Nopember 1918, Sultan Deli menyerahkan tanah kota Medan kepada Gemeente Medan, sehingga resmi menjadi wilayah di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pada masa awal Kotapraja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu dan Kampung Petisah Hilir. Pada tahun 1918 penduduk Medan tercatat sebanyak 43.826 jiwa yang terdiri dari Eropa 409 orang, Indonesia 35.009 orang, Cina 8.269 orang dan Timur Asing lainnya 139 orang. Sejak itu Kota Medan berkembang semakin pesat. Berbagai fasilitas dibangun. Beberapa diantaranya adalah Kantor Stasiun Percobaan AVROS di Kampung Baru (1919), sekarang RISPA, hubungan Kereta Api Pangkalan Brandan - Besitang (1919), Konsulat Amerika (1919), Sekolah Guru Indonesia di Jl. H.M. Yamin sekarang (1923), Mingguan Soematra (1924), Perkumpulan Renang Medan (1924), Pusat Pasar, R.S. Elizabeth, Klinik Sakit Mata dan Lapangan Olah Raga Kebun Bunga (1929). Secara historis perkembangan Kota Medan, sejak awal telah memposisikan menjadi pusat perdagangan (ekspor-impor) sejak masa lalu. sedang dijadikannya medan sebagai ibukota deli juga telah menjadikannya Kota Medan berkembang menjadi pusat pemerintah. sampai saat ini disamping merupakan salah satu daerah kota, juga sekaligus sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara.

d. Kota Medan Masa Penjajahan Jepang

Tahun 1942 penjajahan Belanda berakhir di Sumatera yang ketika itu Jepang mendarat dibeberapa wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan khusus di Sumatera Jepang mendarat di Sumatera Timur. Tentara Jepang yang mendarat di Sumatera adalah tentara XXV yang berpangkalan di Shonanto yang lebih dikenal dengan nama Singapore, tepatnya mereka mendarat tanggal 11 malam 12 Maret 1942. Pasukan ini terdiri dari Divisi Garda Kemaharajaan ke-2 ditambah dengan Divisi ke-18 dipimpin langsung oleh Letjend. Nishimura. Ada empat tempat pendaratan mereka ini yakni Sabang, Ulele, Kuala Bugak (dekat Peurlak Aceh Timur sekarang) dan Tanjung Tiram (kawasan Batubara sekarang). Pasukan tentara Jepang yang mendarat di kawasan Tanjung Tiram

inilah yang masuk ke Kota Medan, mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat disekitarnya secara barter. Mereka bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara Tua orang-orang Asia sehingga mereka dieluelukan menyambut kedatangannya. Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang Kota Medan kacau balau, orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap orang Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukannya yang bernama " Kempetai " (Polisi Militer Jepang). Dengan masuknya Jepang di Kota Medan keadaan segera berubah terutama pemerintahan sipilnya yang zaman Belanda disebut "Gemeente Bestuur" oleh Jepang dirobah menjadi "Medan Sico" (Pemerintahan Kotapraja). Yang menjabat pemerintahan sipil di tingkat Kotapraja Kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasakhi. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur karena masyarakatnya heterogen disebut Syucokan yang ketika itu dijabat oleh T.Nakashima, pembantu Residen disebut dengan Gunseibu. Penguasaan Jepang semakin merajalela di Kota Medan mereka membuat masyarakat semakin papa, karena dengan kondisi demikianlah menurut mereka semakin mudah menguasai seluruh Nusantara, semboyan saudara Tua hanyalah semboyan saja. Disebelah Timur Kota Medan yakni Marindal sekarang dibangun Kengrohositai sejenis pertanian kolektif. Dikawasan Titi Kuning Medan Johor sekarang tidak jauh dari lapangan terbang Polonia sekarang mereka membangun landasan pesawat tempur Jepang.

Dimana-mana diseluruh Indonesia menjelang tahun 1945 bergema persiapan Proklamasi demikian juga di Kota Medan tidak ketinggalan para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh melanda Kota Hiroshima, berarti kekuatan Jepang sudah lumpuh. Sedangkan tentara sekutu berhasrat kembali untuk menduduki Indonesia. Khususnya di kawasan kota Medan dan sekitarnya, ketika penguasa Jepang menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya, terutama yang berhubungan dengan pembinaan dan pengerahan pemuda. Apa yang selama ini mereka lakukan untuk merekrut massa pemuda seperti Heiho, Romusha, Gyu Gun dan Talapeta mereka bubarkan atau kembali kepada masyarakat.

Secara resmi kegiatan ini dibubarkan pada tanggal 20 Agustus 1945 karena pada hari itu pula penguasa Jepang di Sumatera Timur yang disebut Tetsuzo Nakashima mengumumkan kekalahan Jepang. Beliau juga menyampaikan bahwa tugas pasukan mereka dibekas pendudukan untuk menjaga status quo sebelum diserah terimakan pada pasukan sekutu. Sebagian besar anggota pasukan bekas Heiho, Romusha, Talapeta dan latihan Gyu Gun merasa bingung karena kehidupan mereka terhimpit dimana mereka hanya diberikan uang saku yang terbatas, sehingga mereka kelihatan berlalu lalang dengan seragam coklat di tengah kota. Beberapa tokoh pemuda melihat hal demikian mengambil inisiatif untuk menanggulanginya. Terutama bekas perwira Gyu Gun diantaranya Letnan Achmad Tahir mendirikan suatu kepanitiaan untuk menanggulangi para bekas Heiho, Romusha yang famili/saudaranya tidak ada di kota Medan. Panitia ini dinamai dengan "Panitia Penolong Pengangguran Eks Gyu Gun" yang berkantor di Jl. Istana No.17 (Gedung Pemuda sekarang). Tanggal 17 Agustus 1945 gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan walupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor Berita Jepang "Domei" sudah ada perwakilannya di Medan namun mereka tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut, akibatnya masyarakat tambah bingung. Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya tanggal 1 September 1945 yang dipimpin Letnan I Pelaut Brondgeest tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel De Boer (sekarang Hotel Dharma Deli). Tugasnya adalah mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan dari Jepang. Pada ketika itu pula tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Yacobs dan Letnan Brondgeest berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk kawasan Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari eks KNIL dan Polisi Jepang yang pro Belanda. Akhirnya dengan perjalanan yang berliku-liku para pemuda mengadakan berbagai aksi agar bagaimanapun kemerdekaan harus ditegakkan di Indonesia demikian juga di kota Medan yang menjadi bagiannya. Mereka itu adalah Achmad Tahir, Amir Bachrum Nasution, Edisaputra, Rustam Efendy, Gazali Ibrahim, Roos Lila, A.malik Munir, Bahrum Djamil, Marzuki Lubis dan Muhammad Kasim Jusni. Sumber Informasi:

2. Geografi

a. Letak Kota Medan

Kota Medan terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Posisi koordinatnya adalah 3°352 LU dan 98°402 BT. Kota Medan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, timur, dan utara. Medan menjadi tempat yang strategis sebab berada di jalur pelayaran Selat Malaka. Dengan demikian, kota ini menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi domestik dan mancanegara yang melalui Selat Malaka. Selain itu, Medan juga berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan juga beberapa daerah kaya sumber daya alam, mempengaruhi kemampuan Medan dalam hal ekonomi sehingga memiliki hubungan kerjasama yang saling memperkuat dengan daerah sekitarnya.

Luas Kota Medan adalah sekitar 26.510 hektar atau setara dengan 265,10 km^2. Dengan kata lain, Kota Medan memiliki wilayah 3,6% dari keseluruhan Sumatera Utara. Kota Medan jika diperlihatkan secara topografinya cenderung miring ke utara. Kota ini berada pada 2,5 hingga 3,5 meter di atas permukaan laut. Beberapa Sungai yang mengaliri Kota Medan adalah Sungai Belawan, Sungai Badera, Sungai Sikambing, Sungai Putih, Sungai Babura, Sungai Deli, Sungai Sulang-Saling, Sungai Kera, dan Sungai Tuntungan. Pemerintah juga telah membuat kanal besar dengan nama Medan Kanal Timur agar dapat mencegah banjir di beberapa wilayah Kota Medan. Kota Medan dipimpin oleh seorang walikota. Secara administratif, Medan terdiri atas 151 kelurahan dan 21 kecamatan, diantaranya adalah :

1. Medan Tuntungan
2. Medan Johor
3. Medan Amplas
4. Medan Denai
5. Medan Area
6. Medan Kota
7. Medan Maimun
8. Medan Polonia
9. Medan Baru

10. Medan Selayang
11. Medan Sunggal
12. Medan Helvetia
13. Medan Petisah
14. Medan Barat
15. Medan Timur
16. Medan Perjuangan
17. Medan Tembung
18. Medan Deli
19. Medan Labuhan
20. Medan Marelan
21. Medan Belawan

b. Budaya

Berdasarkan sensus tahun 2010, jumlah penduduk Kota Medan adalah 2,109,330 jiwa. penduduk Kota Medan terdiri dari suku Jawa, Mandailing, Minangkabau, Batak, Melayu, Karo, Aceh, Sunda. Selain itu, Suku pendatang dari ras Arab, Tionghoa dan Idia/Tamil. Bahasa yang kerap digunakan penduduk sehari-hari adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, Mandailing, Batak, dan Karo. Suku Melayu banyak berdomisili di pinggiran kota sementara untuk suku Minangkabau dan Tionghoa lebih dominan tinggal di tempat-tempat ramai karena banyak diantaranya menjadi pedagang. suku Mandailing, banyak dijumpai di daerah pinggiran yang lebih nyaman dan tidak sepadat di kawasan perkotaan.

Islam dan Kristen Protestan adalah agama yang dominan di kota ini. kemudian, agama Katholik, Budha dan Hindu. Kota Medan, secara umum memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sehingga mudah menemukan rumah ibadah di kota Medan.

3. Demografis

Kondisi kependudukan Kota Medan mengalami perkembangan

sesuai dengan perkembangan kota, ini di pengaruhi oleh berbagai hal termasuk pertumbuhan kelahiran dan migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Pembangunan kependudukan akan penting karena paktor ini sangat besar peranannya dalam rangka meningkakan kwalitas kependudukan itu sendiri yang sejajar dengan peningkatan pembangunan dalah ssi lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat dari table kependudukan sebagai berikut.

Tabel I
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
dan jenis kelamin tahun 2015

Golongan Umur	Laki Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	102 988	99 065	202 053
5-9	100 465	95 441	195 906
10-14	93 927	89 405	183 332
15-19	106 067	109 850	215 917
20-24	121 784	128 830	250 614
25-29	98 470	100 090	198 560
30-34	86 995	90 398	177 393
35-39	80 632	84 551	165 183
40-44	73 456	75 953	149 409
45-49	63 207	65 817	129 024
50-54	53 487	56 676	110 163
55-59	43 782	45 175	88 957
60-64	30 684	31 455	62 139

65-69	17 730	19 903	37 633
70-74	10 765	13 714	24 479
75+	7 498	12 364	19 862
Jumlah/ *Total*	**1 091 937**	**1 118 687**	**2 210 624**

Sumber : BPS Kota Medan

Tabel II
Penduduk Kota Medan Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2000, 2009, 2015

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	945.847	958.426	1.904.273
2001	960.477	966.043	1.926.520
2002	979.106	984.776	1.963.882
2003	990.216	1.003.386	1.993.602
2004	995.968	1.010.174	2.006.142
2005	1.012.040	1.024.145	2.036.185
2006	1.027.607	1.039.681	2.067.288
2007	1.034.696	1.048.460	2.083.156
2008	1.039.707	1.062.398	2.102.105
2009	1.049.457	1.071.596	2.121.053
2015	1.091.937	1.118. 687	2.210.624

Sumber BPS Kota Medan
*Keterangan: * Angka Sementara*

Data diata menunjukkan bahwa penduduk Kota Medan menurut jenis kelamin lebih banyak jumlah perempuan, hal ini merupakan suatu pola dimana wanita menjadi kelompok mayoritas dan memberi pengaruh terhadap siasana kejiawan secara psikologis. Disamping itu

juga merupakan salah satu aspek yang menjadikan Kota Medan lebih kepada suasana harmonis yang berpengaruh kepada pola sosial dan interaksi dalam kehidupan sosial di Kota medan

Tabel III
Penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin tahun 2015

No	Kecamatan.	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Medan Tuntungan	42 288	43 325	85 613
2.	Medan Johor	65 207	66 805	132 012
3.	Medan Amplas	61 176	62 674	123 850
4.	Medan Denai	72 147	73 914	146 061
5.	Medan Area	48 897	50 095	98 992
6.	Medan Kota	36 769	37 670	74 439
7.	Medan Maimun	20 086	20 577	40 663
8.	Medan Polonia	27 636	28 313	55 949
9.	Medan Baru	20 025	20 515	40 540
10.	Medan Selayang	52 433	53 717	106 150
11.	Medan Sunggal	57 192	58 593	115 785
12.	Medan Helvetia	74 448	76 273	150 721
13.	Medan Petisah	31 303	32 071	63 374
14.	Medan Barat	35 902	36 781	72 683
15.	Medan Timur	55 036	56 384	111 420
16.	Medan Perjuangan	47 361	48 521	95 882
17.	Medan Tembung	67 759	69 419	137 178
18.	Medan Deli	89 632	91 828	181 460
19.	Medan Labuhan	58 025	59 447	117 472
20.	Medan Marelan	80 152	82 115	162 267
21.	Medan Belawan	48 463	49 650	98 113
Kota Medan		1 091 937	1 118 687	2 210 624

Tabel IV
Luas Wilayah Dan Jumlah kepadatan Penduduk
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH KEL	TOTAL	JUMLAH RUTA	KEPADATAN PENDUDUK
1	Medan Tuntungan	20.68	9	85,613	19,848	4.31
2	Medan Johor	14.58	6	132,012	29,951	4.41
3	Medan Amplas	11.19	7	123,850	27,742	4.46
4	Medan Denai	9.05	6	146,061	32,506	4.49
5	Medan Area	5.52	12	98,992	22,373	4.42
6	Medan Kota	5.27	12	74,439	17,679	4.21
7	Medan Maimun	2.98	6	40,663	9,479	4.29
8	Medan Polonia	9.01	5	55,949	12,586	4.45
9	Medan Baru	5.84	6	40,540	11,066	3.66
10	Medan Selayang	12.81	6	106,150	27,684	3.83
11	Medan Sunggal	15.44	6	115,785	27,136	4.27
12	Medan Helvetia	13.16	7	150,721	33,245	4.53
13	Medan Petisah	6.82	7	63,374	15,700	4.04
14	Medan Barat	5.33	6	72,683	17,014	4.27
15	Medan Timur	7.76	11	111,420	26,1	4.27
16	Medan Perjuangan	4.09	9	95,882	23,176	4.14
17	Medan Tembung	7.99	7	137,178	31,033	4.42
18	Medan Deli	20.84	6	181,460	40,410	4.49
19	Medan Labuhan	36.67	6	117,472	25,862	4.54
20	Medan Marelan	23.82	5	162,267	34,730	4.67
21	Medan Belawan	26.25	6	98,113	21,885	4.48
	JUMLAH	**265.10**	**151**	**2,210,624**	**507,205**	**4.36**

4. Konflik di Kota Medan

Kota medan secara sosial, agama dan etnisitas, kelompok sosial,bahasa, budaya merupakan kota yang pluralis, mutikulturalis, secara potensial konflik cukup besar, tetapi seara paktual konflik sangat kecil, dan itupun tidak dapat dikatakan sampai pada bentuk konflik melainkan hanya sebatas gesekan-gesekan sosial dan keagamaan, karena gesekan-gesekan

itu hanya terjadi pada inter agama tertentu bukan antar umat beragama, dan gesekan-gesekan sosial itu tidak mengakibatkan kerusuhan atau korban dalam masyarakat[1].Konflik sara/sosial di Kota Medan hamper tidak ada, yang ada berupa gesekan yang sering terjadi inter umat beragama, contoh terjadi sesama umat beragama terutama pembangunan rumah ibadah. UU mengamanatkan, seperti penggeseran rumah ibadah tatetapi oleh LSM, tidak dapat terima yang akhirnya terjadi gesekan, pada umat lain juga terjadi seperti pembangunan greja, selain itu aliran-aliran dalam agama tertentu, juga ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ustad atau pendeta. Seperti ajaran Tunggul Nababab dalam Kristen, yang mengatakan dirinya adalah Bapa, dan ajaran-ajarannya adalah ajaran bapa, juga dalam agama buda, dan konghucu dimana antara keduanya masih tumpang-tindih. Secara penjelasan mereka adalah konghucu tetapi jika dilihat dari identitasnya ia seorang Budha.

Bijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah sudah jelas, misalnya Keputusan bersama dua Mentri agama dan Mentri dalam negeri tentang pembangunan rumah ibadah dalam undang-undang nomor 9 dan 8 tahun 2006. Hal itu telihat dapat diikuti oleh masyarakat dengan baik. Namun dalam prakteknya terkadang masih ada persoalan-persoalan yang bersifat teknis. Misalnya dalam pendirin rumah ibadah ada oknum yang memanipulasi data tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi misalnya untuk pendirian ibadah harus ada tanda tangan buki dari 90 orang anggota masyarakat sekitar pembangunan rumah ibadah itu dan 60 tandatangan dari masyarakat umum juga memasang pamplet pendirian rumah ibadah dilokasi tersebut selama tiga bulan. Oleh oknum tertentu melakukan manipulasi tandatangan. Sedang dari pihak kementrian agama ketika melakukan observasi kelapangan tentu tidak dapat menjumpai semua orang yang ada tanda angannya itu karena bebeapa hal, Oleh kementrian agama merasa telah terpenuhi persyaratannya, ternyata setelah dikeluarkan surat izin hal ini mendatangkan gesekan diantara masyarakat. Gesekan lainnya adalah adanya penolakan dari anggota masyarakat tertentu karena ketokohannya, perosalannya

[1] Wawancara dengan KTU Kementrian Agama Kota Medan Tanggal 2 Oktober 2018

mungkin dia tidak termasuk yang menandatangani, karena dia sorang tokoh suaranya didengar dilokasi itu, tetapi masyarakat disekirtar itu telah terpenuhi. keberatan itu bersifat pribadi Sehingga menjadi persoalan dan gesekan dalam masyarakat.

Masalah peraturan yang dikeluarkan pemerintah di di Kota Medan, yanag terjadi adalah masalah mayoritas dengan minoritas. Misal pendirian rumah ibadah bagi mayoritas mudah saja untuk mendirikan rumah ibadah, tetapi yang minoritas hal ini menjadi lebih sulit dan kalau mendirikan rumah ibadah tentu mereka harus mendata diwilayah yang lebih luas karena umatnya monoritas. Dan hal ini menjadikan rumah ibadah bagi minoritas akan menjadi terbatas. Jadi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah memiliki plus minus dalam mayarakat umat beragama. Untuk itu pemegang otoritas dan kebijakan yang diterapkan selalu dalam kesamaan dan kesetaraan dalam hukum, untuk itu kerulkunan itu harus dirawat, karena kerukunan itu bukan barang jadi. Dari masyarakat umat beragama itu sampai sat ini tidak pernah menunjukkan penolakan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, karena sampai sekarang tidak ada upaya-upaya konflik terhadap atuan-aturan itu Konflik yang ada di Kota Medan adalah berupa gesekan-gesekan sosial dalam beberapa hal yang tidak sampai menimbulkan kekacauan sosial atau korban. Gesekan-gesekan itupun hanya sebatas internal umat beragama bukan antar umat beragama, seperti persoalan paham dan ajaran dari tokoh-tokoh agamanya, pendirin rumah ibadah dimana adanya penolakan dari oknum masyarakat dilingkungan rumah ibadah yang didirikan, dan penolakan itu hanya bersifat pribadi tetapi karena ia seorang tokoh, masyarakat mendengarnya. Dan dalam memenuhi persyaratan yang diamanahkan uu no 9 dan 8 tahun 2006,[2] membutuhkan 90 tandatangan dari jamah yang berdomisili ditempat itu, juga 60 tanda-tangan dari masyarakat umum dan syarat-syarat lainnya yang harus

[2] Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006. Lihat pada Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah . Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kota Medan Tim Penyusun; Palid Muda Harahap, Karo Sekali, sutopo, Hasyim Syaid.. Terbitan ke 5. Penerbit Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Medan. Tahun 2016, hal. 39-58.

dipenuhi sesuai dengan ketentuan keputusan bersama dua mentri nomor 9 dan 8 itu akan menjadikan kesulitan bagi umat Bergama minoritas. Tetapi hingga sekarang penolakan terhadap peraturan pemerintah atau keputusan bersama dua mentri itu belum terdengar dan itu dilaksanakan oleh umat beragama dan masyarakat dengan baik, meskipun kerukunan itu harus dirawat oleh pemerintah dengan melakukan kegiatan bersama umat beraga, mengadakan rapat-rapt sebagaimana yang dikatakan oleh KTU Kementrian agama Kota Medan dan secara terpisah diaminkan oleh ketua FKUB Kota medan. Senada dengan itu tokoh-tokoh masyarakat baik dari kalangan Kristen, Budha dan Hindu juga Konghucu memiliki persepsi yang sama bahwa kota medan sangat kondusif. Meski ada gesekan-gesekan sosial dan ahama (sara) tetapi itu masih dalam kontek kewajaran sebgai masyarakat yang sangat pluralis. Kota medan adalah miniaturnya Indonesia, sebagaimana yang sebutkan oleh Ketua FKUB, Modan sangat pluralis, semua agama, suku, ras, kelompok sosial, budaya bahasa, adat istiadat dan perbedaan karakter masyarakat menjadi kekayaan dan keharmonisan yang dilandasi oleh kesadaran eksistensia dari masyarakat dan pemeluk agama, sebagaimana yang dikatan oleh tokoh masyarakat Dr Amad Zuhri, Lc, MA Untuk Kota Medan potensi konflik sangat besar tetapi koflik yang terjadi sangat kecil, konflik yang terjadi seperti pendirian rumah ibadah hanya berupa ketidak setujuan pendiriannya, juga seperti konfli kuburan didenai, perebutan jenazah karena agama. Konflik yang ada masih dapat dikendalikan, disebabkan oleh peran pemerintah kota yang memperlakukan semua umat beragama secara seimbang, pemahamna umat beraga tentang eksistensi umat beragama salaing memahami, peran pemerintah melkukan perhatian bantuan dan sumbangan kepada umat begarama. Termasuk peran tokoh agama dalam menyampaikan kebaikan, termasuk dialog dalam masyrakat yang dilakukan. Pemerintah punya peran dalam berbagai hal. Misal ketika ada kasus konflik melakukan pemanggilan tokoh-tokoh agama denan melakukan dialog kamudian turun kelapangan selanjutnya pemerintah melakukan kontribusi, dengan memberikan bantuan-bantuan baik materil maupun sprituil dalam bentuk bentuk inilah pemeritah menyeimbangkan kondisi dalam masyarakat dan umat beragama.

Selain konflik yang berupa gesekan-gesekan soaial dalam masyarakat di Kota Medan terjadi konflik sosial dan itu terjadi dibawah tujuh dan sepuluh tahun yang lalau berupa konflik antar pemuda seperti konflik antara Pemuda Pancasila (PP) dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di Petisah dan sekitarnya berupa perselisihan mengenai lahan parkir dan lainnya konflik ini menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, juga yang terjadi di Helvetia juga antar pemuda lagi-lagi dipicu hal yang sama, juga yang terjadi di Perumnas Mandala melibatkan PP dan IPK. Tetapi sesuaidengan penjelsan Kementrian Agama Kota Meda (KTU) dalam rentang sepuluh tahun terahir ini konflik-konflik dikota Medan bolh dikatakan tidak ada, yang ada hanya gsekatn sosial dan perbedaan persepdi dalam sosial, dan hal itu sejauh ini masih dapat diatasi dengan pendekatan-pendekatan dan dialog dengan masyarakat dan tokoh-tokohnya. Kota Medan pada saat ini kondusif meski demikian menurut beliau ibarat berkenderan kecelakaan itu sering terjadi pada jalan yang mulus, karena kehilangan kewaspadaan, maka Pemerintahan Kota Medan dengan jajarannya termasuk kementriann agama, FKUB dan seluruh peangkat daerah melakukan pertemuan-pertemuan sekali dalam sebulan untuk mengantisipasi hal-haal yang mungkin terjadi. Dengan berbagai kegiatan, seperti jalan santai kerukunan, kerja bakti kerukunan, perlombaan kerukunan, senam kerukunan dan lain sebagainya yang kesemuanya mengeratkan dan merukunkan warga Kota medan tanpa melihat agama, suku, budaya dan asal daerahnya. Semua bergabung dalam kesatuan yang harmonis dalam merajut kebersamaan dan kepedulian antara satu dengan lainnya.

B. Tanjung Balai

1. Geografis

Kota Tanjungbalai merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara. Secara astronomis Kota Tanjungbalai terletak pada koordinat 2^{0}58’15" – 3^{0}01’32" LU dan 99°48’00" – 99°50’16" BT, merupakan daerah pertemuan 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai

Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura dan Thailand. Wilayah Kota Tanjungbalai dikelilingi oleh Kabupaten Asahan dan merupakan *hinterland* dengan Kabupaten Labuhan Batu, Simalungun, Karo dan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Sumatera Utara serta Provinsi Kepulauan Riau. Kota Tanjungbalai kini memiliki sebutan baru yakni *Mutiara Selat Malaka di Hilir Danau Toba*

Berdasarkan letak geografisnya tersebut Kota Tanjungbalai sangat strategis dan ekonomis. Terlebih lagi didukung oleh tersedianya sarana, prasarana, infrastruktur dan aksebilitas yang cukup memadai, baik berupa modal transportasi darat, laut, jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara maupun negara tetangga.

2. Luas Wilayah, Batas Administrasi dan Penggunaan Lahan

Seperti telah dikemukakan di atas, saat ini Kota Tanjungbalai memiliki luas wilayah ± 60,52 km^2 atau ± 6.052 Ha. Luas wilayah Kota Tanjungbalai hanya 0,08 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Letak wilayah Kota Tanjungbalai secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Asahan yang rinciannya seperti tertera pada Tabel V berikut :

Tabel V
Batas Wilayah Administrasi Kota Tanjungbalai

No	Uraian	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan
2.	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
3.	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
4.	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan

Adapun luas wilayah Kota Tanjungbalai menurut Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel VI
Luas Wilayah Kota Tanjungbalai berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase
1.	Datuk Bandar	5	2.249	37,16
2.	Datuk Bandar Timur	5	1.457	24,08
3.	Tanjungbalai Selatan	6	198	3,27
4.	Tanjungbalai Utara	5	84	1,39
5.	Sei Tualang Raso	5	809	13,36
6.	Teluk Nibung	5	1.255	20,74
	Jumlah	**31**	**6.052**	**100,00**

Sumber Data: BPS Kota Tanjungbalai Tahun 2015

3. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan letak geografis yang sangat strategis, maka potensi Kota Tanjungbalai yang dapat dikembangkan antara lain :

1. Sebagai Pusat Pelayanan Sekunder A yakni Pusat Pembangunan Kawasan Sektor Unggulan meliputi : Perkebunan, Pertanian dan Industri terhadap wilayah hinterlandnya sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebagai jalur transit perdagangan internasional dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dan Pelabuhan alternatif bagi daerah hinterland, seperti : Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Riau Kepulauan, Pesisir Provinsi Riau dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara.
3. Mempunyai lahan yang cukup luas dan produktif untuk pengembangan sebagai kota industri, perdagangan, pelayanan jasa telekomunikasi

yang didukung oleh Pelabuhan Teluk Nibung sebagai andalan keluar masuk barang (ekspor – impor) dan penumpang.

4. Dapat dilalui dengan sarana transportasi baik darat maupun sungai.
5. Fasilitas andalan yang tersedia seperti : jaringan air minum, listrik, transportasi darat dan kereta api, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta sarana lainnya.
6. Mempunyai sumber daya alam yang dapat dikembangkan di sektor perikanan khsususnya perikanan tangkap dan budidaya.
7. Sumber daya manusia yang dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan kedepan.
8. Sumber daya alam yang tersedia seperti: kandungan mineral, galian C Sungai Silau dan Sungai Asahan. Sumber daya alam yang sangat besar dari sungai Asahan adalah pasir sungai. Pasir sungai Asahan ini merupakan bahan alami yang terbentuk dari proses pengikisan tanah disepanjang sungai mulai dari hulu hingga hilir. Pasir sungai Asahan mengandung 70-80% silica. Dengan kandungan silica yang besar ini pasir sungai Asahan mempunyai karakteristik yang khas dan sangat baik untuk :
   - Bahan baku industri kaca
   - Bahan baku penyaring dan penjernih air
   - Bahan baku pencampur dalam industri keramik dan porselin
   - Bahan baku untuk kontruksi

Sumber : Bagian Pemerintaha Kota tanjung Balai

4. Sejarah

Berdasarkan sejarah, keberadaaan Kota Tanjungbalai tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan Asahan yang telah berdiri ± 392 tahun yang lalu. Tepatnya dengan penobatan Sultan Abdul Jalil sebagai raja pertama Kerajaan Asahan di Kampung Tanjung yang merupakan cikal bakal nama Tanjungbalai pada tahun 1620. Asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada disekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai

Asahan. Lama – kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang – orang yang ingin berpergian ke hulu sungai Silau dan sungai Asahan. Tempat itu kemudian dinamai "Kampung Tanjung" dan orang lazim menyebutnya "Balai Di Tanjung".

Tanggal 27 Desember yang merupakan hari mangkatnya Sultan Kerajaan Aceh Sultan Iskandar Muda yang merupakan ayahanda Sultan Abdul Jalil, telah dijadikan sebagai hari lahir Kota Tanjungbalai yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Tanjungbalai Nomor 4/DPRD/TB/1986 tanggal 25 Nopember 1986.

Kerajaan Asahan pernah diperintah oleh delapan orang raja sejak raja pertama Sultan Abdul Jalil pada tahun 1620 sampai dengan raja terakhir Sultan Syaibun Abdul Jalil Rahmadsyah pada tahun 1933. Raja terakhir mangkat pada tanggal 17 April 1980 di Medan dan dimakamkan di lingkungan Mesjid Raya Tanjungbalai.

Di zaman penjajahan Belanda, pertumbuhan dan perkembangan Kota Tanjungbalai semakin meningkat dan strategis. Kota Tanjungbalai dijadikan sebagai *Gementee* berdasarkan *Besluit G.G*. tanggal 27 Juni 1917 dengan *Stbl*. 1917 Nomor 284. Hal ini sejalan dengan berdirinya perkebunan-perkebunan di daerah Asahan dan Sumatera Timur, seperti H.A.P.M, SIPEF, London Sumatera (Lonsum) dan lain-lain. Pembangunan jalur transportasi seperti jalan, jembatan dan jalur kereta api mempermudah akses ke Kota Tanjungbalai. Sehingga hasil-hasil dari perkebunan dapat dipasarkan dengan lancar ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjungbalai. Maka Kota Tanjungbalai berkembang sebagai kota pelabuhan yang diperhitungkan di pantai timur Sumatera Utara.

Pembukaan kantor-kantor dagang berbagai maskapai Belanda di Tanjungbalai pada abad XX, seperti K.P.M., Borsumeij dan lain-lain, maka mulailah bangsa Eropa menetap di Kota Tanjungbalai. *Asisten Resident van Asahan* berkedudukan di Tanjungbalai yang jabatannya bertindak sebagai Walikota dan Ketua Dewan Kota (*Voorzitter van den Gemeenteraad*). Maka mulai saat itu Kota Tanjungbalai selain tempat kedudukan Raja, juga merupakan tempat kedudukan Asisten Resident.

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan Kota Tanjungbalai sebagai daerah otonom ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 (LN Tahun 1956 Nomor 60, TLN Nomor 1092) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, nama *Gementee* Tanjungbalai diganti dengan Kota Kecil Tanjungbalai. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor U.P.15/2/3 tanggal 18 September 1956, jabatan Walikota Tanjungbalai terpisah dari Bupati Asahan. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, nama Kota Kecil Tanjungbalai diganti menjadi Kotapraja Tanjungbalai.

Pada waktu *Gementee* Tanjungbalai didirikan tahun 1917, luas wilayah Kota Tanjungbalai hanya 106 Ha. Atas persetujuan Bupati Asahan melalui Maklumat Nomor 260 tanggal 11 Januari 1958, daerah-daerah yang dikeluarkan (menurut Stbl. 1917 Nomor 641) dikembalikan pada batas semula, sehingga luasnya menjadi ± 190-200 Ha (± 2 km^2). Berdasarkan Sensus penduduk tahun 1980, dengan luas wilayah 2 km^2 dan jumlah penduduk ± 40.000 jiwa (kepadatan penduduk ± 20.000 jiwa per km^2), menjadikan Kota Tanjungbalai sebagai Kota terpadat di Asia Tenggara saat itu.

Selanjutnya dengan terbitnya PP Nomor 11 Tahun 1984 (LN Tahun 1984 Nomor 12) tanggal 29 Maret 1984, maka oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Mendagri, pada tanggal 5 Januari 1985 telah meresmikan terbentuknya 2 (dua) Kecamatan di Kotamadya Dati II Tanjungbalai, yaitu Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara.

Kemudian berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tanjungbalai dengan Kabupaten Dati II Asahan, serta Inmendagri Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan PP Nomor 20 tahun 1987, maka luas wilayah Kota Tanjungbalai berubah menjadi 6.052 Ha dengan 5 Kecamatan 11 Kelurahan dan 19 Desa. Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Wilayah Kota Tanjungbalai, 19 Desa tersebut telah diubah statusnya menjadi Kelurahan. Semenjak itulah di Kota Tanjungbalai terdapat 5 Kecamatan dengan 30 Kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 tahun 2005 telah ditetapkan pembentukan Kecamatan Datuk Bandar Timur sebagai hasil pemekaran Kecamatan Datuk Bandar. Selanjutnya berdasarkan Perda Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2006 telah ditetapkan pembentukan Kelurahan Pantai Johor di Kecamatan Datuk Bandar. Dengan demikian sampai saat ini, Kota Tanjungbalai terdiri dari 6 Kecamatan dan 31 Kelurahan.

Sumber : Bagian pemerintahan Kota Tanjung Balai

1. Demografis

Secara demografis Tanjung Balai bersifat pluralis, yang terdiri dari berbagai agama, etnis, budaya, bahasa, adat-istiadat, dan warna kulit, Etnis Melayu sedikit menempati wilayah kota dan melingkupi pinggiran Tanjung Balai demikian juga batak, Sedang etnis cina berda dikota Tanjung Balai sedikit pada daerah pinggiran dan bercampur dengan masyarakat. Demikian juga etnis India berada di daerah kota dan pinggiran. Interaksi sosial terpola dua, cina dan melayu. Cina diperkotaan khususnya mereka mengelompokkan diri secara eksklussif, karena mereka berada pada posisi ekonomi dan perdagangan, hubungan mereka dengan masyarakat lainnya hanaya sebatas perdagangan saja, interaksi ekonomi, tidak berinteraksi secara sosial sebagaimana dalam masyarakat, disamping mereka beragama dan berbudaya serta dengan karakter sendiri yang tidak mempunyai kaitan dengan masyarakat setempat. Dapat dikatakan hubungan etnis cina kota dengan masyarakat hanya sebatas hubungan ekonomi semata. Masyarkat Melayu umumnya berada pada pinggiran kota, yang betcampur dengan etnis cina, batak dan India, hubungan sosialnya cukup baik, masyarakat mengatakan perbedaan etnis, agama dan budaya tidak membatasi interaksi mereka, seperti di jalan karya, tempat kasus 29 juli 2016 itu terjadi. Etnis cina yang rumahnya berhadap-hadapan dengan etnis Melayu, berinteraksi dengan harmoni, etnis cina ditempat itu ada yang berdomisili sekitar 27 tahun, tidak pernah membuat masalah dalam masyarakat. Sedangkan Meliana yang baru berdomisili 7/8 tahun, menurut penuturan masyarakat tidak memiliki interaksi dengan masyarakat, sikap dan tindakannya

angkuh, dan eksklusif. Pergi kerja pada waktu subuh kembali setelah malam.

2. Kehidupan agama

Kehidupan agama masyarakat Tanjung Balai dapat dikatakan sangat agamis, Islam sebagai agama mayoritas masyarakat khususnya etnis melayu, sebahagian Batak/Melayu batak; etnis batak yang memiliki tradisi Melayu, bahkan informasi mengatakan bahwa Melayu itu sebenarnya dari etnis Batak bermarga Margolang, mereka banyak yang bermarga batak, seperti sitorus, pardede dan lain sebagainya. Terminologi Melayu di Tanjung Balai adalah Muslim, Jika dikatakan Melayu itu pasti Muslim. Karena itu disebut Melayumuslim. Namun sebahagian batak bukan muslim, tetapi Kristen sedangkan cina beragama Budha, Hindu dan khonghucu, dann etnis India beragama Hindu. Kehidupan agama berjalan dengan baik, rumah-rumah ibadah masing, masingterbangun dengan meski terkadang berada disekeliling umat beraga lain, greja, klenteng/ vihara maupun mesjid, masing-masing penganut agama yang berbeda saling menghormati antara satu dengan lainnya. Masyarakat mengatakan tidak ada masalah, karena masing-masing melaksanakan agamanya dan tidak menggangu kepada umat lain. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Hal ini berjalan sejak dulu, kata masyarakat yang sejak kecil beliau telah ada didaerah itu. Bagi umat Islam mengumandangkan azan setip waktunya dan melaksanakan sholat berjamaah di mesjid, Ketika subuh peneliti mendengar azan berkumandang dari menara mesjid, sholat berjamaah, hingga zikir dan tahlil yang dibaca secara kuat, peneliti sendiri merasa bahwa tahlilnya kuat sekali, apakah ini dilaksanakan sejak dahulu demikian, masyarakat mengatakan memang demikian. Jadi tidak ada masalah. Greja juga membunyikan loncengnya dengan kuat pada hari munggu, klenteng dan vihara hidup dengan kunjungan umat budha, khonghucu, bahkan pada sore hari di vihara Triratna, umatnya melakukan senam bersama untuk kebugaran anggotanya, peneliti juga melihat dalam senam kebugaran itu tidak saja etnis cina tetapi juga ada beberapa orang yang berjilbab, sepertinya merea adalah muslim.

Kehidupan agama yang harmonis demikian itu berjalan dengan baik tanpa masalah, hanya saja tindakan-tindakan sekelompok tertentu saja atau tindakan-tindakan yang bersifat individu dari umat yang berbeda yang membuat kehidupan agama di Tanjung Balai menjadi masalah, seerti pendirian patung, diatas stupa vuhara triratna, komlin Meliana terhadap pengeras suara, dan kerusuhan sosial antar mafia cina.

Antar penganut agama saling mengerti tentang kehidupan agama masing-masing dimana setiap orang harus melaksanakan agamanya secara baik yang didukung oleh sarana dan prasarana keagamaannya.

3. Konstruksi budaya

Tanjung Balai merupakan kota yang sangat padat dengan pluralis masyarakat, agama,bahasa, etnis dan budaya. Budaya Melayu sebagai bagian dari konstruksi sosial dan merupakan konstruksi budaya yang merupakan sikap hidup tindakan dan pandangan hidup, tidak dapat dipisahkan dari semua bentuk kepribadian masyarakat secara umum. Sehingga masyarakat Tanjung Balai terlihat menjadi suatu bentuk dan karakter dalam masyarakat, meski secara khusus nantinya terlihat unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, seperti karakter etnis cina, India, Batak, Jawa, Mandailing, Padang. Tetapi secara umum citra budaya yang menjadi konstruksi sosial di Tanjung Balai sangat kental dengan Budaya Melayunya. Dan Melayu itu sendiri mencerminkan Islam sebagai satu ungkapan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Secara konstruktur Melayu identik dengan Islam dan Islam itu dipancarkan oleh Melayu. Dalam konstruksi Budaya Melayu, Islam adalah senyawa dengan Melayu itu dendiri, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Jika dikatakan Melayu secara otomatis mengikutkan islam didalamnya. Kuatnya senyawa Melayu-Islam, dapat terlihat dari kepribadian masyarakat melayu dalam arti luas (Melayu dalam arti luas bukan hanya beretnis Melayu saja, tetapi termasuk etnis-etnis lainnya seperti Batak-Toba, Jawa, Mandiling, Padang) yang terserap kedalam Melayu, dilihat dari cara hidup, bertingkah laku, berbicara dan semua sikap hidup kepribadinnya sama dengan Melayu.

Kuatnya Melayu-Islam dalam konstruksi budaya di Tanjung Balai menjadi satu aspek sosial secara sosial-kultural menjadi kekuatan pemersatu, solidaritas sosial dn stabilitas sosial, Dimana kultur Melayu-Islam memiliki ciri khusus seperti sifat toleran yang tinggi, keterbukaan dan solidaritas yang baik, sehingga menjadi sistim sosial yang merekat semua unsure sosial di Tanjung Balai. Peneliti melihat bahwa Tanjung balai akan kuat memegang konstruk Budaya Melayu Islam ini, meski menurut penuturan masyarakat[3] hal ini telah mulai melonggar dan terjadi pergeseran pandangan hidup dan pergesern nilai-nilai, seiring dengn perkembangan dan kemajuan sosial, tetapi prinsif-prinsif Melayu-Islam masih tetp terpelihara dalam masyarakat.

4. Etnisitas

Sosial Tanjung Balai, sangat pluralis yang terdiri dari keragaman, agama, cultural dan budaya, ekonomu, sosial dan etnis. Di Tanjung Balai terdapat beberapa enik, Melayu, Batak, cina, india,

a. Etnik Melayu

Secara historis Orang pertama datang ke Tanjung Balai adalah orang Toba (batak), turun dari Tapanuli Utara pada abad 16, Orang Melayu itu adalah orang Batak itu sendiri. *Kapak, bukan sembarang Kapak, kapak pembelah kayu, Batak bukan sembarang batak, batak dah jadi Melayu.* Orang Batak seperti Sirait, Panjaitan, silalahi, siorus, simangunsong, pardede dan lain-lain. Hal itu muncul begitu merdeka maka marga-marga Batak itu muncul dalam masyarakat. yang sejak mereka ada di Tanjung Balai, semasa sultan, mereka itu menyembunyikan marga-marganya, karena kuatnya pengaruh dan wibawa sultan, dengan simbol Islam. Dan penduduk yang berdomisili di kesultanan menjadi Muslim dan Aceh juga muslim Ketika masuk kemalaka, dan defenisi Melayu di Tanjungbalai adalah *Muslim*. Hal ini sama dengan diseluruh

[3] Wawancara dengan Bapak Dailami Tokoh Masyarakat tanjung Balai. 2 September 2018

Indonesia yang ada adalah melayu secara umum, meski ada perbedaan jika dilihat secara khusus, dengan adanya, Toba, aceh, padang, Melayu. Jawa, dayak dan lain sebagainya. Tetapi secara umum, semua itu adalah Melayu. Khususnya di tanjungbalai yang memiliki pluralitas kultural dilhat secara khusus semua itu adalah melayu itu sendiri dan melayu itu adalah muslim atau beragama Islam.[4] Namun setelah Indonesia merdeka terjadi pergeseran sosial Toba yang tadinya menghilangkan marga-marga mereka, kembali memunculkan marga mereka, tetapi tetap sebagai muslim. Toba yang tidak pandai berbahasa toba, tetapi Toba yang berbudaya-bahasa melayu dan muslim, yang berbeda dari toba pendatang berikutnya mereka tetap toba beragama Kristen dan berbudaya toba.

Etnis melayu yang mendiami Tajungbalai Asahan adalah etns melayu dan batak. Disamping itu etnis tersebut terdapat juga beberapa etnis lainnya, seperti jawa, aceh, Minang, India, dan tionghoa., Namun etnis melayu merupakan motor utama penggerak roda peradaban dan kebudayaan di tanjungbalai Asahan. Etnis-etnis lainnya yang bermukim didaerah ini telah menyesuaikan diri kedalam kebudayaan melayu sebagai budaya pemersatu dari etnis-etnis yang berbeda itu. Oleh karenanya, idak mengherankan kalau didaerah ini terdapat pemuka-pemuka adat melayu Tanjungbalai yang memiliki marga atau sebutan lainnya yang berasal dari hubungan primordialnya. Namun umumnya mereka telah meleburkan diri sebagai etnis melayu.[5]

---

[4] Wawanara dengan Pak Tono, (peg. Kesbang poll, tanjungbalai tanggal 3 September 2018), dalam wawancara Menurut beliau melayu itu, merupakan penamaan dari ras, bukan bersifat etnis, karena semua orang di Indonesia ini adalah melayu (ras Melayu). Namun wawancara dengan tokoh masyarakat Mahmun silalahi, etnis batak yang tersublimasi kedalam melayu mengatakan etnis Melayu di tanjungbalai adalah mereka dari kerabat raja itu sendiri. Dan jikadi ontranskan kembali dengan pendaat Tono, bahwa raja di tanjungbalai adalah keturunan dari sultan Aceh dengan karo. Atau dari keturuna Batak bermarga Margolang.hal ini perlu lagi diteliti lebih lanjut

[5] Husnel Anwar matondang (ed), Tujuh Butir Peluru Untuk Negeriku ; Perjuangan syekh Ismail Abdul wahab Untuk Ibu Pertiwi dalam Merintiss dan Mempertahankan Kemerdekaan RI. Kontributor Ramli abdul Wahid. Pen' Perdana publishingcet. I, 2017. Hal. 29.

b. Etnik Batak (Muslim dan Kristen)

Etnis Toba terbagi dua secara agama, Etnis Toba migrasi pertama mereka banyak yang memeluk Islam sehubungan dengan kuatnya wibawa sultan yang berkuasa dan mereka melepaskan marga-marga mereka sehingga dengan mudah berbaur dengan masyarakat Melayu umumnya, Etnis Toba dari Utara ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai Melayu, dengan kultur dan bahasa Melayu beragama Islam Islam. Eksistensi mereka sangat larut dalam masyarakat, bahkan menurut penuturan masyarakat Etnis Toba Utara ini menjadi tokoh-tokoh Melayu itu sendiri, mereka banyak diunsur pemerintahan, Ulama, pendidik, tokoh masyarakat dengan majunya pemikiran mereka. Dengan demikian Etnis toba Utara ini bukan sekedar masyarakat biasa sebagai pendatang, tetapi mereka adalah tokoh-tokoh sosial dan ulama yang eksistensinya kuat di tanjungbalai.

Kemudian Etnis Toba yang migrasi berikutnya setelah kemerdekaan, mereka tidak seperti saudaranya migrasi pertama yang mengubah agamanya mereka tetap beragam Kristen dan kepercayaan lainnya karena perubahan zaman dimana kebebasan beragama dan kepercayaan sudah menjadi hak-hak asasi dan dilindungi Negara, perubahan agama tidak lagi mejadi persoalan dalam masyarakat mereka tidak mempunyai halangan untuk berintegrasi dengan masyarakat umumnya. Sehubungan dengan hal ini Etnis Toba Utara migrasi pertama mereka kembali memunculkan marga-marga mereka, sehingga di Tanjungbalai ada Melayu yang bermarga Toba Utara yang berbahasa Melayu dan beragama Islam, berkultur Melayu bahkan seluruh karakternya berbudaya Melayu dan Toba Utara yang berbahasa toba Utara, berkarakter toba dan beragama Kristen.

c. Etnik Jawa (Muslim)

Enis Jawa di Tanjungbalai termasuk etnis pendatang, keberadaan mereka di Tanjung balai sehubungan dengan terbukanya perkebunan di Sumatera Timur termasuk di Tebing dan Tanjungbalai. Etnis Jawa pada mulanya dibawa oleh perusahan-perusahaan perkebunan dari Jawa, pada mulanya mereka terpokus dalam wilayah perkebunan, kemudian

mereka memasuki daerah dan wilayah masyarakat di tanjungbalai. Meskipun kemudian ada dari Etnis Jawa yang datang ke Medan dan daerah seitarnya termasuk Tanjungbalai untuk mengadu nasib di kota ini. Etnis Jawa yang datang ke Tanjungbalai beragam Islam meskipun kebanyakan bersifat Islam abangan yang pada umumnya dari golongan bawah ditempat asalnya, tetapi karena mereka beragama Islam dan memiliki sifat dan karakter yang baik, mudah bersosialisasi, pekerja yang gigih dan kuat mereka diharapkan masyarakat dalam berbagai pekerjaan. Dan dalam sosial mudah mengikuti kultur masyarakat setempat, tidak memiliki ambisi pribadi. Dengan karakter yang demikian etnis jawa sangat larut dalam masyarakat bahkan mereka sangat paham dengan kondisi yang mereka hadapi.

d. Etnik Cina (Budha, Hindu, Khonghucu dan lain-lain)

Etnis cina datang ke Tanjung balai abad 17, pada masa kesultanan mereka ditempatkan sultan disekitar jalan Asahan. Cina pada lapisan kedua yang dibawa oleh Belanda, sedang cina lapisan pertama seperti laksamana Cengho yang datang sendiri. Cina lapisan kedua ini membawa modal dan segera menguasai bidang ekonomi di Tanjunbalai, mereka menggunakan kesempatan kondisional Tanjung balai, membangun gudang-gudang disepanjang pesisir sungai di Tanjungbalai. Mengusai perdagangan dan pengelolaan pelayaran penangkapan ikan, juga perdagangan, menguasai toko-toko dan semua sarana perekonomian. Etnis cina pada lapisan kedua ini secara sosiologis mereka mampu berinteraksi dengan masyarakat, berhubungan secara sosial, interaksi sosial masyarakat cukup harmonis. Namun tahun 2008, terjadi konflik antar mereka, dua mafia, Abi besok dan abeng korbannya terjadi kebakar ruko dan toko-toko sebanyak 208 buah dengan radius 2 km, jika diperhitungkan dari segi wilayah kebakaran itu hanya dikawasan tempat tingga etnis cina itu sendiri di tanjung Balai. Perseteruan mafia ini menyebabkan etnis cina itu sendiri yang menjadi korban dan cina lapisan kedua ini eksodus dari Tanjungbalai perg keJakarta, Tebing, Medan dan lain-lain dan masuk cina lapisan ketiga, keberadaan mereka juga menguasai perekonomian Tanjungbalai, sedang masyarakat setempat tidak juga

memperoleh porsi dalam hal perekonomian di tanjungbalai. Cina lapisan ketiga ini berbeda dari cina lapisan kedua, khususnya dalam interaksi sosial, mereka bersifat eksklussif, dan tidak berinteraksi dengan masyarakat setempat, serta mengelompokksn diri pada sosial khusus yang terpisah dari masyarakat setempat. Etnis cina sampai saat ini masih bersifat migrasi dari daerah lain masuk ke Tajung balai, seperti dari daerah Bagan siapi-api, termasuk Meliana etnis cina yang baru berdomisili di Tanjung balai

Secara umum etnisitas di Tanjung Balai terintegrasi dalam masyarakat, tetapi ditinjau secara mendalam maka akan tampak bahwa masyarakat secara etnis terpolarisasi pada wilayah huniannya, terlihat kelompok-kelompok etnis terkonsentrasi pada daerah dan lingkungannya masing-masing, meski ada sebahagian kecil tersublimasi kedalam masyarakat secara cair. Dikota Tanjung balai sudah mejadi hunian etnis cina dan interaksi diantara mereka menggunakan bahasa cina, hanya jika berhubungan dengan etnis lain menggunakan bahasa Indonesia, seperti halnya di Kota Medan mereka menggunakan bahasa cina dengan bebas sehingga etnis cina terlihat terpisah dari masyarakat umum. Persoalan bahasa komunikasi, memang menjadi masalah interaksi kepada masyarakat, etnis cina dihadapan etnis lainnya jika berbahasa sesama mereka menggunakan bahasa cina, tanpa merasa segan dihadapan etnis lain, bahkan terlihat seperti mereka memaksakan, memperdengarkan bahasa nenek moyangnya kepada orang lain yang juga memiliki bahasa dan budaya juga. Kondisi yang demikian berbeda dengan etnis cina yang betempat tinggal didalam masyarakat, meski mereka berbahasa cina tetapi hanya didalam rumahnya saja dan ini tidak terdengar oleh masyarakat, mereka terlihat hanya menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa nenek moyangnya hanya dipergunakan didalam rumah dan dengan keluarganya saja.Menurut salah satu anggota LSM Tanjungbalai, cina di Tanjung balai besifat angkuh, tamak dan tidak baik.[6] Cara hidup mereka yang eksklusif, berbahasa cina berbudaya cina bahkan kedai kopi merekapun

[6] Wawncara dengan anggota LSM (tidak mau disebut nama) tanggal 16 Oktober 2018.

mereka pisahkan dengan melayu, terlihat sepertinya mereklah yang berbudaya tinggi, menganggap rendah kepada atnis setempat, bahkan ada yang masih tidak bisa berbahasa Indonesia, hal ini seiring dengan yang dikatakan pak Tono, bahwa mereka beberapa kali menangkap warga cina yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan diserahkan kepadan imigrasi tanjungbalai, tetapi tidak jelas ujungnya kemana, akhirnya mereka bosan melakukan hal itu. Etnis cina sebahagian laigi bergabung ditengah-tengah masyarakat. Menurut penuturan bapak Dailami, cina yang ada ditengah-tengah masyarakat ini, membeli tanah-tanah kosong dari masyarakat yang berupa rawa-rawa didepan atau belakang rumah-rumah penduduk kemudian mereka bangun rumah dan bertempattinggal disitu, terkadang tanah yang mereka bangun dekat dengan mesjid dan rumah-rumah ibadah oreng muslim, tetapi mereka tidak peduli, mengingat lahan ditanjungbalai sempit, Dengan demikian etnis cina bertabur diantara penduduk asli Melayu, padawaktu observasi terlihat jarak rumah etnis melayu dan mesjid dengan etnis cina terkadang hanya 8 meter, khususnya di Mesjid al-ma'sum tempat Meliani yang memicu konflik tahun 2016 di Tanjungbalai. Tetai menurut penuturan masyarakat sekitar mesjid al-Ma'sum etnis cina yang ada disekitar mesjid baik dan bersoaialisasi dan interaksi dengan masyarakat, Selama ini (ada yang sudah bertempat tinggal 27 tahun) tidak ada masalah, bahkan etnis cina yang dekat dengan mesjid merasa tidak terganggu dan mereka tertolaong dengan suara azan subuh untuk bangun dan melaksanakan tugas-tugas hidupnya. Ketika observasi keseluruh Tanjungbalai, peneliti mendapatkan banyaknya Vihara deseluruh Tanjungbalai baik dikota maupun dilingkungan penduduk muslim, bahkan keluar kota dan perkampungan melayu. terlihat agak riskan meski waga melayu tidak memperlihatkan hal ini, dan mengatakan tidak masalah, tetapi hal ini menurut peneliti dapat menyebabkan konflik setiap saat. Salah satu yang peneliti amati adalah tidak teraturnya pendirian rumah ibadah dan masyarakat terlihat tidak dapat menyatakan isi hati meeka.

e. Etnik India (Hidu/Budha)

Etnis Hindu di Tanjungbalai menjadi kelompok masyarakat pendatang

sejak terjdinya agresi militer di Indonesia, meski sebelumnya mereka terdapat di Indonesia sebagai pedagang dan pelancong, Keberadaan mereka di Tanjungbalai cukup baik dan memiliki sifat lentur terhadap masyarakat lokal, komunikasi dan interksi berjalan dengan baik karena mereka bersosialisasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, sedang bahasa etnisnya tidak dijadikan sebagai bahasa interaksi dalam masyarakat. Etnis India memiliki agama Hindu dan sebahagian budha tetapi pada umumnya mereka beraga Hindu, mereka bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai dan sebahagian berdomisili secara meyebar ditengah-tengah masyararakat, pada umumnya etnis India dapat memahami keadaan dan menghormati kultur lokal dan bekerja sama dengan penduduk setempat.

Budaya India yang lentur dengan budaya Melayu mejadikan etnis ini tidak mejadi permasalahan di Kota Tanjungbalai, demikian juga dari etnis Melayu dapat meneruma keberadaannya ditengah-tengah masyarakat, selama ini etnis India tidak pernh menimbulkan persoalan dan gesekan atau konflik dengan masyarakat lokal, karena sikap soaialnya dan bdayanya yang dekat dengan budaya Melayu.

5. Konflik dan Integrasi

a. Konflik Di Tanjung Balai

Dailami menjelaskan peristiwa 29/30 juli 2016. Awal kejadian adalah Meilana[7] seorang Etnis Cina/Tionghoa mendatangi Mesjid. Tetapi pada saat itu pengurus Mesjid tidak ada dilokasi mesjid, Meliana mendatangi rumah disamping Mesjid, selain itu rumah berfungsi sebagai kedei gorengan oleh seseorang yang dipanggil masyarakat Mak Uo. Meilana menitipkan pesan untuk disampaikan kepada pengurus Mesjid[8]. Setelah

[7] Meliani, seorang etnis Cina/Tionghoa beraga Budha, ada yang mengatakan Kristen Khatolik, Bertempat tingga di jalan Karya Tanjung Balai sejak 7 tahun silam, dia adalah imigran dari Bagan siapi-api.

[8] Menurut penuturan salah seorang pegawai Kesbangpool, Meliani mendatangi mesjid sudah beberapa kali dan sebelumnya sudah pernah terlibat pertengkaran, namun didamaikan oleh aparat. Dalam hal ini tidak diselesaikan dengan tuntas.

pesan Meliana disampaikan, pengurus Mesjid berinisiatif untuk berkunjung kerumah Meliani yang berjarak 10 meter didepan mesjid, salah satunya bapak Dailami sendiri (sekretaris Mesjid). Pengurus mesjid tiba di rumah Meliana sekitar jam 6 sore, pengurus mesjid disambut dengan tidak ramah, tidak disuruh masuk rumah, mereka yang datang disemprot didepan pintu rumah dengan kata-kata kasar dan bentak-bentakan, *lululu* dan mengatakan pengeras suara mesjid membikin, hari-hari tak dapat tidur, pekak telinga, bising dan kata-kata yang tidak menyenangkan perasaan. Suara keras Meliana dengan bahasa cina dan bercampur bahasa Indonesia, anak Meliana juga ikut nimbrung menyalahkan pengurus Mesjid dengan cara yang tidak menyenangkan, Setelah itu pengurus mesjid pulang. Suaminya datang memintak maaf, pengurus mesjid mengatakan ya kami maafkan, tapi kepada masyarakat juga mintak maaflah, pada saat itu meliana dirumahnya menghempaskan pintu dengan keras sehingga terdengar kemesjid, masyarakat menjadi ramai, terkonsentrasi disekitar Mesjid, hingga malam jumat tanggal 30 Juli 2016. Keadaan yang semakin tidak terkendali meski aparat juga ada dilokasi keadaan semakin ramai hingga menjelang shalat Isa malam itu, Kondisi pada saat itu mencekam dimana masyarakat terkonsentrasi disekitar mesjid dan semakin ramai saja, selanjutnya Meliana dan keluarganya diamankan oleh kepling. Dan kemudian dipindahkan kekantor lurah. Dikantor lurah diadakan perdamaian dengan membuat surat perjanjian, yang dihadiri aparat keamanan, kepling dan polisi, lurah mengatakan, untuk dua tiga hari ini jangan dulu kembali kerumah, tapi Meliana menjawab, ah, sayakan warga negara Indonesia kenapa diusir-usir, tak bisa tinggal disitu, dengan ributnya pada saat yang sama ada orang yang hendak memukul suami Meliana, Meliana dan keluarganya dilarikan ke kantor polsek TB Selatan, dan disana sudah ada FKUB, Marolop, MUI, melihat situasi itu polsek juga takut kemudia dilarikan kekantor polres, sekitar jam sebelas malam, masyarakat juga telah ramai disitu yang berentet dengan terjadinya pembakaran klenteng/Vihara Budha di Tanjung Balai tanpa halangan.

Pembakaran klenteng-klenteng Budha dilakukan secara cepat sepertinya para pelaku pembakaran disetiap klenteng telah siaga dan

tindakan pembakaran dilakukan secara bersamaan dan spontan[9] pada malam 30 juli 2016 itu, masyarakat meyakini bahwa tindakan pembakaran itu tidak dikomandokan oleh siapapun, meskipun masyarakat berbeda pendapat. pembakaran klenteng-klenteng itu hanya pada bagian penyembahan atau pedupaannya saja tetapi berita itu menjadi isu nasional bahkan keluar negeri dengan intensifnya alat komunikasi. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota masyarakat yang berdomisili disamping mesjid, (tidak mau disebut nama), Beliau mengatakan bahwa kejadian tanggal 29 juli 2016 itu hanya sebagai pemicu saja, peneliti menanya apa sebab lainnya. beliau mengatakan, mungkin ada tuntutan masyarakat yang selama ini tidak dipenuhi dan ini menjadi ganjalan perasaan tidak baik dari masyarakat. Beliau menutup pembicaraan dengan senyum. Menurut penuturan salah seorang pegawai kesbangpool, bahwa Meliana sebenarnya telah beberapa kali mendatangi mesjid, bahkan pada limabelas hari puasa sebelumnya telah datang ke mesjid dengan sikap tidak baik, terahir kelai keempat itulah yang menjadi letupan Konflik Tanjung Balai tanggal 29 juli 2016. Kedatangan meliana sebelum kasus itu telah membuat gegernya masyarakat, namun dapat diredam dengan dibekap oleh aparat dan menutupi kasus itu. Seiring dengan hal tersebut peneliti mendapatkan informasi dari salah seorang fungsionaris FKUB. Bahwa penyebab dasar adalah tuntutan masyarakat terhadap penurunan patung sejak tahun 2009/2010 lalu, dimana telah disepakati untuk menurunkan patung di Vihara Triratna.[10] Namun

[9] seperti acara yang diprakarsai oleh Polres dengan beberapa elemen masyarakat untuk menyatukan persepsi Tanjung Balai damai tanggal 3 Sep 2018, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, FKUB, Pihak Polres menyepakati bahwa kejadian tanggal 29 Juli 2016, adalah kejadian spontanitas, tidak dikomandoi siapapun, tidak konflik agama, merupakan kasus tunggal Meliana dan Meliana telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Medan 18 bulan penjara. Oleh karena itu masyarakat Tanjung Balai tidak perlu menyalahkan siapapun. Tidak terpancing dengan propokasi luar. Di negeri ini siapapun akan menghadapi hukum tanpa pilih bulu sesuai dengan kesalahnnya masing masing. Pernyataan sikap masyarakat Tanjung Balai diharapkan dapat menyatukan kembali masyarakat, tidak terpancing dengan isu yang dihembuskan orang luar yang nota bene tidak tahu apa-apa mengenai kejadiannya.

[10] Patung ini memiliki ketinggian 6 meter dan didirikan diatas gedung lantai 4 (empat) menghadap ke Timur laut sedang disebelah timurnya berdiri

Penurunan patung tidak juga dilaksanakan meski telah ada kesepakatan pemerintah, tokoh-tokoh masyaraka, tokoh agama, pengadilan negeri, kejaksaan negeri, Walikota. MUI, FKUB, Kemenag dan semua unsur yang memiliki hubungan termasuk umat yang mendirikan patung tersebut, masing-masing telah menandatangani, hal ini terus berlarut-larut menjadi keresahan masyarakat Tanjung Balai yang notabene mayoritas muslim yang taat. Selama penurunan patung belum dilaksanakan beredar bermacam isu dalam masyarakat baik yang bersifat sosial maupun teologis hingga menyebabkan tidak stabilnya psikologis sosial. Adapun isu tersebut antara lain mengatakan; Tanjung Bali telah menjadi negara patung, dengan adanya patung tersebut rezeki umat Islam akan berkurang/ malikat rahmat tidak datang lagi kekota Tanjung Balai dengan demikian rezeki umat Islam akan berkurang bahkan akan hilang. Mesjid-mesji yang berdiri disebelah timur patung orang yang sholat dimesjid itu sebenarnya menyembah dan berdoa kepada patung dan lain-lain. Karena tuntutan masyarakat tidak dilaksanakan dengan konsisten, maka terjadilah demo yang berkepanjangan menuntut penurunan patung tersebut secara sporadis. Mesjid-mesjid menyuarakan penurunan patung dan hari-hari jumat masyarakat terkonsentrasi di mesjid, selanjutnya melakukan demo ke wali kota, polres, DPRD dan lain-lain, dengan dikawal aparat keamanan. Masyarakat Tanjung Balai menyimpan ketidak senangan ini secara tertutup, Pemerintah dan aparat sepertinya meredam perasaan masyarakat ini dengan menggelar seremoni, seperti yang dikatakan oleh salah seorang pegawai Kesbangpool dengan berupa pidato-pidatoan, photo-photoan, pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi dengan mengundang komponen masyarakat, tokoh-tokoh agama, FKUB, MUI dan lain-lain. Pertemuan-pertemuan komponen masyarakat itu hanya sebagai peredam, bukan penyelesaian masyalah istilahnya hanya sebagai *kamuflase* dengan memperlihatkan inilah kami di Tanjung Balai yang damai, demokratis. Tetapi yang sebenarnya terjadi konflik tertutup yang siap meledak dan menyebabkan kerusuhan yang hebat. Ketika peneliti memperdalam kepada subjek penelitian. Apakah pemerintah

---

beberapa mesjid. Yang ketika orang shalat atau berdoa ke utara agak persis menghadap kepatung tersebut.

tidak mengetahui kondisi psikologis dan kedaan sosial masyarakat Tanjung Balai, hal ini dijawab tahu, namun tidak ada solusi yang pasti dari pemerintah. Hal in sangat disayangkan persoalan besar sedang terjadi dalam masyarakat, tetapi tidak diselesaikan dengan baik oleh pemerintah setempat. Dari Persoalan yang terjadi jika ditelusuri secara mendalam dan dikontraskan dengan pernyataan sikap bersama tokoh-tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Polres Tanjung Balai pada tanggal 3 september 2018 oleh inisiatip Kapolres dengan beberapa elemen masyarakat, bahwa konflik Tanjung Balai bukan konflik agama, etnik dan ras, tetapi konflik sosial. Masyarakat Tanjung Balailah yang lebih tahu tentang hal ini, sedang orang luar tidak mengetahuinya. Kita tidak perlu mendengar orang luar. Kita disini ternyata aman-aman saja, kita tidak boleh terpengaruh dengan propokasi orang luar. Kemudian menyatakan ikrar deklarasi bersama sebagai berikut:

Satu. Kami warga Tanjung Balai adalah berketuhanan yang maha esa yang menjunjung tinggi kebinnekaan dan kesetaraan diantara semua keragaman suku, agama dan ras antar-golongan

Dua kami warga Tanjung Balai saling menghargai perbedaan ajaran agama dan keyakinan masing-masing dalam menciptakan suasana damai dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tiga. Kami warga Tanjung Balai sanggup menjaga kerukunan dalam kehidupan umat beragama, berbangsa dan bermasayarakat di Indonesia berdasarkan Pancasila dan dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Empat.Kami Warga Tanjung Balai, menghormati putusan Majlis hakim atas ponisnya Meliana dipengadilan negeri Medan sesuai Undang undang yang berlaku setra mengecam propokasi yang tidak bertanggung jawab dalam penggiringan opini yang dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam kedaulatan NKRI

Lima. Kami warga Tanjung Balai akan terus menjaga keharmonisan dan kedamaian di Kota Tanjung Balai dalam menyongsong pemilihan umum tahun 2019 mendatang

Dalam hal ini pertanyaan mendasar terhadap konflik Tanjung Balai, apakah konflik agama, etnik dan ras atau konflik sosial.

Dari rentetan pristiwa konflik sejak tahun 1979, 1982, 1992, 2010 dan 2016, terlihat adanya tumpang tindih sebab, yang berkelindan antara satu sama lainnya, Tahu 1979, meruakan konflik etnis, yang dipicu masalah ekonomi dan perlakuan yang tidak baik dari etnis Aceh terhadap etnis Melayu. Peristiwa konflik itu mengakibatkan korban sebanyak 108 orang diantara keduanya. Ini terlihat ada juga kaitannya dengan etnis cina, sebagai pemilik kapal dan menguasai perdagangan di Tanjung Balai, antara lain karena etnis cina membiarkan perlakuan etnis Aceh yang sewenang-wenang mengenai harga dan upah etnis Melayu yang bekerja ebagai awak kapal penangkap ikan. Dan tahun 1982 etnis cina juga akhirnya eksodus dari Tanjung Balai karena tidak tahan dengan kondisi di Tanjung Balai. Sedang etnis Aceh terusir dari tanjung Balai sebab merekalah pemicu konflik tersebut.

Konflik tahun 1979 ini, telah berlalu 29 tahun yang lalu hingga sekarang tahun 2018. Namun secara psikologis meninggalkan trauma jiwa dan catatan terhadap etnis-etnis pendatang (cina, Aceh)

Konflik sosial di Tanjung Balai menurut penuturan bapak..... sebenarnya bukan disebabkan paktor tunggal saja (kasus Meliana) tetapi merupakan akibat dari serentetan peristiwa yang saling berkaitan dan tidak terselesaikan dengan baik, meski dilakukan upaya-upaya mediasi perdamaan oleh pemerintah Daerah Tanjung Balai, yang oleh sebahagian kalangan menganggap bahwa perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah hanya dipermukaan saja, tidak menyentuh akar permasalahan masyarakat Tanjung Balai. Konflik pertama di Tanjung Balai terjadi pada tahun 1979 yang dikenal dengan Konflik Melayu dengan etnis Aceh. Konflik ini menelan korban lebih dari seratus orang sekitar 108 orang. Akar masalahnya adala faktor ekonomi dan perasaan tidak senang oleh orang Melayu terhadap tindakan-tindakan dan tekanan-tekanan etnis Aceh. Sejak abad ke 17 sebagai gelombang ke dua enis Cina masuk ke Indonesia, (gelombang pertama yakni masuknya seperti Laksamana Cengho), etnis cina telah terdapat di Tanjung Balai dan telah menguasai sumber-sumber ekonomi, terutama perdagangan

dan hubungannya dengan pelayaran, penangkapan ikan, Etnis Cina telah menguasai kapal-kapal penangkap ikan dan memiliki gudang-gudang. Pada saat itu etnis cina mempercayakan kapal-kapal penagkap ikan ini kepada etnis Aceh sebagai *tekong* (kapten kapal), sedang pekerjanya adalah etnis Melayu Tanjung Balai. Etnis Melayu banyak yang bekerja sebagai buruh kapal, pengelola ikan, hasil tangkapan dilaut, interaksi antara cina, etnis aceh dan etnis melayu dalam hal ini hanya sebatas pekerjaan, tidak ada komunikasi harmonis sebenarnya, dan pekerjaan sebagai buruh kapal dilakukan karena tidak ada pekerjaan lain secara sosial etnis Melayu berada pada level bawah. Disamping itu upah buruh kapal ini diberikan berupa ikan (lima kilo-lima kila) yang kemudia dijual kepada mereka dengan harga yang tidak menyenangkan dimana ikan itu dijual dengan harga yang mereka tentukan pula. Termasuk juga perilaku tekong-tekong kapal yang tidak baik bahkan mengganggu keluarga para buruh kapal ikan. Ketidak senangan etnis Melayu ini menajam sehingga terjadi konflik dan kerusuhan tahun 1979 dan ini merupakn peristia yang terus menjadi trauma dan inspirasi. Dari tahun 1979 amapai tahun '1982 masih terjadi sejumlah konflik meski antara cina dengan melayu, sedangkan etnis Aceh keluar (eksodus) dari Tanjung Balai,bersmaan dengan itu etnis cina juga eksodus dari Tanjung Balai karena tidak tahan, mereka lari ke Medan, Jawa ebing.

Tahun 1982 orang cina masuk lagi ke Tanjung Balai karena peluang ekonomi dimana dengan mempermainkan hasil tangkapan ikan. Dimana ikan dari luar dijual dari tanjung Balai ke portklang, Malaysia pada hal ikan dari luar dijual ke portklang dengan harga yang lebih mahal dengan cap Tanjung Balai. Tahun 1982 keberhasilah ekonomi cina sangat meningkat dengan pukat Harimau, dan sikap etnis cina yang tertutup eksklussif berbeda dengan cina yang lama mereka dapat berbaur dengan masyarakat, dan tahun 1982 ini terjadi konflik antar mereka. Etnis cina yang datang kemudian ini disamping bersifat *eksklusif* juga lebih kasar sikapnya dan merasa lebih tinggi derajat dan kebudayaannya, secara psikologis mereka merasa lebih tinggi dari etnis Melayu setempat. Mereka tidak berinteraksi, melainkan dalam sehari-hari melakukan aktivitas, seperti perdagangan, sehingga mereka hanya berinterasi sesama mereka sendiri dengan bahasa, kultur sendiri yang berbeda dengan masayarakat.

Hal ini juga menjadikan masyarakat setempat juga tidak mengambil open dan cendrung cuek kepada etnis cina.

b. Pendirian Rumah Ibadah

Vihara Triratna pada mulanya hanya sebuah klenteng kecil dipinggur sungai asahan, yang didirikan oleh etnis cina dan tidak memiliki surat pembangunan, setelah dilakukan reklamasi dipinggir sungai maka etnis cina mengurus surat izin renovsinya. Namun yang dilakukan bukan renovasi tetapi pembangunan vihara dan membesarkannya. Dalam hal ini masyarakat Tanjungbalai sebenarnya tidak bodoh mereka tahu pengertian renovasi dengan pembangunan, setiap bertambah fundasi bangungan bukanlah namanya renovasi tetapi pembangunan, namun masyarakat tetap diam demi alasan ketentraman Tanjungbalai. Selanjutnya masyarakat dikejutkan oleh berdirinya patung diatas stupa persis diatas bangunan Vihara Triratna dipinggir sungai yang diresmikan oleh wali kota, pada waktu itu Tamrin munthe dan dihadiri oleh unsur pemerintah, FKUB, termasuk pak Khaidir yang mewakili kemenag. Sebenanya mereka tidak memiliki izin pendirian bangunan apalagi pendirian patung, hal ini menjadikan konflik dan keributan. Isu berkembang dimasyarakat bahwa Tanjungbalai telah menjadi negara patung, dengan konflik dan ribut-ribut itu, oleh pemerintah memanggil panitia pendirian patung dan unsur-unsur pemerintah, wali kota, kejaksaan, kepolisian FKUB. Untuk menurunkannya, hal itu terjadi tahun 2010. Namun tidak berhasil diturunkan, ini terjadi bertepatan dengan waktu pemilihan wali kota yang pada waktu itu kandidatnya termasuk pak Eka anak walikota lama pak Sutrisno dan Tamrin Munte, sedang sebelumnya Tamrin Munte sebagai wakil Wali Kota. Kandidat Eka dan kelompoknya mengkampanyekan jika mereka menang, patung tidak akan turun dan mengkomunikasikannya sampai kejakarta ke Walubi dan lain-lain, sedangkan Tamrin tidak membicarakannya. Ternyata yang menang Tamrin Munte, dan Tamrin Munte selama kepemimpinannya di Tanjungbalai tidak membicarakan masalah patung, tidak berbuat apa-apa, tidak ada penjelasan, kalaupun ada hanya panas-panas taik ayam, demimian penjelasan nara sumber, adapun FKUB, merasa dirinya harus ada ditengah

perseteruan, mereka hanya sebagai payung yang mendinginkan, selam itu terjadi gejolak sosial dengan suasana yang tidak stabil, hari-hari demo dengan pengawalan petugas kepolisian, hingga terjadi konflik tanggal 29 juli 2016. Konflik ini dilihat sangat memiliki dasar dimana yang membuat masalah etnis cina, dan selama ini patung berdiri oleh etnis cina, dapat dibuktikan dengan kata-kata masyarakat ketika terjadi konflik tersebut dengan mengatakan, *ini sudah lama kami tunggu-unggu*, *ini sudah lama kami tunggu-tunggu, habisss*. Orang-orang yang berkumpul di sekitar mesjid, polsek, dan polres disuruh untuk pulang, namun tidak ada yang mau pulang, hingga menjelang tengah malam dan terjadinya pembakaran terhadap 14 klenteng/Vihara di Tanjung Balai. Peneliti melihat Klenteng/Vihara yang dibakar semuanya berada didalam kota Tanjung Balai, Klenteng ini berdiri persis ditengah-tengah pemukiman masyarakat yang bercampur dengan rumah-rumah orang cina. Tanjung Balai sedikit unik dimana masyarakatnya bercampur dengan demikian, rumah penduduknya berhadap-hadapan, demikian juga rumah ibadahnya, sedang pekerjaan bermacam-macam dari usaha penangkapan ikan, hingga usaha perdagangan semua bercampur dalam lingkup masyarakat kota Tanjung Balai yang pluralistik. Pendirian rumah-rumah ibadah yang tercampur ditengah-tengah pemukiman penduduk terlihat berdiri secara acak. Vihara, mesjid klenteng, gereja berdiri berdekatan dan didalam masyarakat yang berbeda agama. Namun ada kekhususan dengan mesjid, mesjid berdiri lebih dulu dari pada penganut agama lain datang, rumah-rumah orang cina yang ada disekitar mesjid datang kemudian, karena orang-orang Melayu atau penduduk setempat menjualnya kepada etnis cina maupun etns lainnya yang berbeda agama. Contohnya Mesjid al-Ma'sum, jalan karya Tanjungbalai yang merupakan awal dari konflik tanggal 29 juli 2016, Mesjid ini sejak lama sebelum etnis cina kelingkungan ini merupakan sebuah musholla kecil letaknya hanya disebuah gang yang kemudian dibesarkan menjadi jalan, mesjid ini sejak lama telah menggunakan pengeras suara, untuk azan dan lainnya, kemudia mesjid direnovasi dan diresmikan tahun 1984 menjadi mesjid dan besarnya hanya sekitar 8 x25 meter, dan memiliki sebuah menara kecil setinggi 6 meter, memiliki toa (pengeras suara) ada 3 buah dan satu mati. Memang satu menghadap

kerumah Meliana. Pada mulanya masyarakat yang berdomisili ditempat itu semuanya adalah muslim. Karena muslim selalu mendirikan mesjinya dilingkungannya tidak dilingkungan penganut lain. Tetapi selanjutnya orang lain dan penganut agama lain masuk kedarah itu dan berdomisili disitu bergaul dengan penduduk muslim. Jika masuk ke jalan karya ini terlihat sebelah kiri semuanya penganut muslim dan sebelah kanan penduduk etnis cina dan muslim . Ketika peneliti bertanya kepada penduduk muslim bagaima mereka bergaul dengan baik, saling menegor dan bersosialisasi. Adajuga orang cina yang tinggal ditempat itu sudah puluhan tahun dan adajuga yang baru tahunan seperti Meliana, sebagai pemicu konflik Tanjung Balai itu. Jika dikatakan masyarakat Tanjung Balai yang pluralis tidak demokratis hal ini terbukti selama ini tidak ada persoalan dengan pengeras suara mesjid maupun suara lonceng gereja atau bau asap pedupaan klenteng dan vihara, semuanya terjadi dengan baik dan cukup harmonis dan saling menghargai. Sedang pendirian klenteng dan vihara berdiri saja demikian ditengah-tengah penduduk muslim, penduduk muslim tidak tahu apakah pendiriannya sesuai atau tidak sesuai namun penduduk muslim diam saja, hingga klenten dan vihara begitu banyak berdiri ditengah-tengan umat Islam. Dalam hal pendirian rumah ibadah jika dilihat kepada keotusan bersama dua mentri, Mentri Agama dan mentri dalam negeri no 9 dan 8 tahun 2016 tentang pendirian rumah ibadah yang mengharuskan syarat-syarat tertentu, hal ini menjadi perhatian, bahwa penduduk khususnya cina harus diperhatikan oleh pemerintah, ini tidak diperhatikan pemerintah dengan baik. Pemerintah tidak melaksanakan aturan-aturan yang telah ada tetapi cendrung membiarkan saja apapun yang terjadi, bahkan gejolak yang terjadi dimasayarakat tidak diperhatikan, bahkan cendrung membekap orang-orang tertentu yang melakukan tindakan yang melukai perasaan muslim demikian pernyataan masyarakat.

BAB IV

KONFLIK, OTORITAS DAN KEBIJAKAN

A. Konflik

Konflik yang terjadi di Sumatera Utara terlihat memiliki hubungan yang berkelindan antara berbagai aspek; sosial, ekonomi, etnisitas, kultural, politik juga agama, sehingga konflik-konflik itu sendiri tidak dapat disebutkan oleh satu sebab saja, dan hal ini yang menjadikan pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang memiliki otoritas, berbeda pendapat dan mengambil sebab yang lebih mendinginkan bagi masyarakat, meskipun tampaknya sebeb-sebab konflik yang disebutkan oleh tokoh-tokoh masyarakat maupun pemegang otoritas itu terlihat tidak tepat[1], dan ada juga yang bersikap realistis terhadap problema masyarakat, tetapi untuk mengatakan yang sebenarnya mereka tidak cukup kuat untuk melawan arus sebagaimana yang dinyatakan oleh lainnya. Konflik-konflik itu sendiri jika dilihat secara mendalam jauh bersumber dari paktor masyarakat kepentingan-kepentingan mereka

[1]Perbedaan persepsi tentang konflik ini terkadang tidak realistis, meskipun ada yang menanggapinya secara realistis tetapi tidak dapat mengatakan yang sebenarnya, demi terciptanya kedamaian, tetapi hal ini hanya menjadi bom waktu, untuk ledakan konflik yang lebih besar. Misalya, apakah konflk agama atau konflik etnis, atau konflik sosial atau konflik ekonomi. Yang dikatakan dan dikembangkan bukan konflik agama, bukan konflik etnis, bukan konflik ekonomi dan lain-lain. Sehingga tidak ditetapkan konflik apa dan hal ini mengambang dalam masyarakat, tetapi ada juga tokoh masyarakat yang realistis, menetapkan sebagai konflik agama (kasus Meliana di Tanjungbalai misalnya).

terkadang tidak terpenuhi dimana kelompok sosial-agama, maupun kelompok sosial lainnya dalam masyarakat terjadi pelanggaran-pelanggaran tata nilai oleh sekelompok lainnya, Berbagai kasus konflik yang terjadi dimasyarakat, antara lain. Konflik pendirian Vihara yang diatasnya ada Patung (2010), Konflik protes Meliana (seorang warga etnis Cina) terhadap pengeras suara mesjid dekat rumahnya, kedua konflik ini terjadi di Tanjungbalai, Konflik terahir ini menjadi isu nasional tahun 2016, meski tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi merusak sejumlah vihara Budha dan ketegangan yang mencekam didalam masyarakat pada saat kejadian. Selain dari konflik itu terdapat pula sejumlah konflik masih di Tanjungbalai sebelumnya (1982), seperti, konflik sosial yang melibatkan kelompok-kelompok geng dan mafia Abey besok dan abeng (keduanya etnis Cina). Konflik ini hanya melibatkan antar pemuda dengan sekelompok lainnya, terjadi pembakaran ruko-ruko dilingkungan etnis cina itu sendiri. Dan jika diruntut kewaktu sebelumnya termasuk konflik antara Tekong yang beretnis Aceh dengan awak kapal ikan dari etnis Melayu (1979). Dan dibelakangnya adalah etnis Cina pemilik kapal dan gudang di Tanjung-balai. Sedang di Kota Medan konflik yang terjadi seperti konflik antar pemuda di Petisah dan Belawan dan memakan korban jiwa, ini disebabkan perebutan lahan parkir. Ada juga konflik di Helvetia sebagai akibat dari percekcokan remaja yang berbeda agama, kemudian membesar menjadi seperti konflik agama, selan itu gesekan-gesekan dikalangan internal umat beragama yang tidak menimbulkan konflik terbuka dan lain-lain. Konflik-konflik yang terjadi di Sumatera Utara memiliki kaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, etnisistas, budaya dan agama itu sendiri, dimana terjadi dialeg dengan masyarakat secara faktual.

Masyarakat Sumatera Utara sangat heterogen, pluralitas sosilanya sangat tinggi dalam hal-hal diatas (sosial-ekonomi,politik, budaya etnisitas dan agama) dan pluralitas ini tidak teratur dalam masyarakat, semua itu bercampur dengan bebas, sesuai dengan keinginan warga, seperti tempat tinggal, usaha dan pekerjaan (bangunan pabrik, sekolah, perkantoran dan lain-lain bercampur dalam satu kawasan), pendirian rumah ibadah (dilingkunagan penganut lain, atau mendirikan rumah dilingkungan rumah ibadah penganut agama lain), kegiatan keagamaan, budaya. Pola penyebaran penduduk dan pembangunan perumahan dalam

lingkungan atau kawasan menunjukkan tidak adanya pengaturan dari pemilik otoritas. Masyarakat bahkan bebas untuk mengapresiaskan keagamaannya tanpa melihat kenyataan nilai-nilai sosial, agama dan kultural masyarakat lainnya oleh sekelompok tertentu dalam masyarakat. Kebebasan sosial ini disebabkan pola pikir sosial *liberal* (tidak memiliki nilai etis, *kebablasan*).

Peneliti melihat bahwa Konflik yang terjadi di Sumatera Utara secara esensial adalah konflik ***sara* (*suku, agama, ras dan antar kelompok*)** yang berkelindan dengan persoalan ekonomi, politik, hukum dan ketidak adilan[2] sosial dari pemilik otoritas. Meski pandangan peneliti ini masih bersifat *debatable*, dan ada yang berpandangan sebaliknya tetapi menurut peneliti hanya untuk alasan ketentraman sementara, bahkan kontra *produktif* dan tidak bersifat *solutif*, dimana cendrung didiamkan tidak diselesaikan dengan arif. Kasus-asus konflik tersebut memang tidak murni *sara*, tetapi pendorong yang sesungguhnya adalah faktor *sara*. Meskipun tiak semua konflik disebabkan oleh *sara*, tetapi kasus-kasus besar yang berdampak nasional dapat dikategorikan adalah berlatar belakang *sara*.

Konflik-konflik diatas memberi pemahaman bahwa Sumatera Utara secara sosial tidak sunyi dari konflik, meski dilakukan berbagai pecegahan dan upaya-upaya sinergi oleh pemegang otoritas dengan sejumlah kebijakan ekonomi, sosial-agama, sosial etnis, sosial kultural dan sosial politik. Hal ini karena konflk dalam masyarakat secara teoritis adalah suatu keniscayaan skibat dari interaksi sosial itu sendiri. Namun jika konflik terus terjadi itu artinya masyarakat memiliki problematika sebagai masyarakat yang sakit. Daya immun sosial terhadap konflik lemah, arena itu diperlukan kekuatan dan otoritas dan kebijakan dalam melakukan intervensi (sebagai kekuatan memaksa) untuk dapat mengatur masyarakat kearah harmonis dan kebaikan sosial, baik berupa peraturan, undang-undang dengan sangsinya yang mengatur jalannya kehidupan

---

[2] Pandangan yang demikian didukung oleh tokoh-tokoh dan beberapa masyarakat yang tidak mau disebut namanya. Mereka menganggap sebenarnya pemerintah juga tahu hal ini, tetapi mengalihkan persoalan yang besar menjadi sederhana, yang menurut sumber ini hanya menyimpan bom waktu saja

sosial kearah yang lebih harmonis. Namun peraturan-peraturan dan sangsinya yang dikeluarkan pemerintah terkadang tidak cukup untuk memuaskan semua orang, justru bisa saja menimbulkan konflik baru dalam masyarakat. Hal ini tentu harus mendapat perhatian. Disamping itu diperlukan budaya yang memliki nilai-nilai kearifan lokal disamping tokoh tokoh tradsional, dan tokoh-tokoh kharismatik yang memiliki otoritas sosial untuk menciptakan keharmonisan masyarakat. Yang terahir ini seperti yang disinyalir peneliti terutama tokoh kharismatik tidak ada lagi ditengah-tengah masyarakat, jikapun ada mereka sudah tua sekali, sedang penggantinya tidak ada[3]

B. Otoritas

Otoritas (*Authority*) atau wewenang sebagaimana yang disebutkan aleh Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku *Power and Society*, bawa wewenang adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya. Menrut Max Weber (864-1922) wewenang terbagi tiga macam yaitu, tradsional, kharismatik dan rasional legal.[4]

Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuasaan mistik atau religius seorang pemimpin. Sedang wewenang rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional

---

[3]Seperti yang diungkapkan oleh bapak Dailami, tokoh masyarakt dan tokoh agama di Tanjung Balai. Wawancara tanggal 15 Septembet 2018, Seiring dengan hal ini Tamrin Munte juga mengatakaan hal yang sama

[4]S.N Eisenstadt, (ed) *Max Weber on Charisma and Institution Building*, Chicago, Uniersity Of Chicago Press, 1986, hal. 46. Lihat Meriam budi ardjo Dasar-dara Ilmu Poltik.

yang melandasi kedudukan seorang pemimpin, yang ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan-aturan yang mendasari tingkah lakunya.[5]

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Sumatera Utara dua otoritas pertama (Tradisonal dan kharismatik) meskipun ada hampir-hampir tidak ditemukan lagi dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Dailami dan Tamrin Munte. Tamrin Munte menjelaskan,

Tokoh kharismatik yang benar-benar refresentatif dalam masyarakat, yang benar-benar mengerti ajaran Islam dengan berdasarkan keilmuan Islam menguasai ilmu-ilmu Islam, seperti tauhid, fiqh, quran, hadis, tasawuf dan lain-lain, menguasai ilmu alat Bahasa Arab serta konsen dalam persoalan-persoalan umat Islam, diikuti, diakui dan dipercaya masyarakat yang dapat memutuskan berbagai persoalan-persoalan atau konflik, problematik masyarakat, tidak lagi ditemukan pada zaman ini, melainkan guru-guru agama, ustad-ustad (*muballig*) yang hanya menguasai sedikit dari ilmu Islam dan mereka tidak konsen dengan persoalan umat secara penuh, mereka tidak hidup ditengah ummat Islam secara jelas, melainkan jika masyarakat memerlukan tausiahnya, mereka dipanggil, guru keliling. Meskipun masih ada tidak lagi memiliki otortas dengan pergeseran nilai dan istitusi dizaman modern, masyarakat lebih beralih kepada otoritas formal yang berdasarkan hukum negara.[6]

Hilangnya tokoh-tokoh tradisonal dan kharismatik dalam masyarakat, menjadikan masyarakat kehilangan tiang-tiang yang menyanggah stabilitas sosial, dimana masyarakat selalu mengalami berbagai persoalan, agama, hukum, moral, sosila, kultural dan segala macam didalamnya. Masyarakat tidak memiliki acuan, teladan yang secara langsung dapat dilihat dari praktek hidup seorang tokoh. Sementara otoritas formal memiliki kesulitan-kesulitas dalam mendekatinya untuk menyampaikan problematik sosial harus bersifat birokraif yang akhirnya tidak menyelesaikan

---

[5]Miriam Bidiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi baru, Penerbit, PT Grameia Pustaka Utama, disi revisi,Cetakan II, 2008,hal.64.

[6] Wawancara dengan Thamrin Munte, Mantan Wali Kota tanjungbalai priode 2010-2014) pada tanggal 16 September 2018

persoalan, Otoritas pada tingkat bawah (otoritas tradisonal dan kharismatik) tidak ada, sementara otorotas formal tidak menyelesaikan persoalan, terjadi penggantungan masalah. Menjadikan masalah-masalah sosial ibarat bisul (*ngot-ngot, tarsongon tungkol dibagasan ngadol)* kata orang mandailing. Terasa sakit seperti rasa sakit didalam gigi yang sudah rapuh.

Otoritas rasional-formal dengan seperangkat hukum dan undang-undang, sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam menjalankan fungsinya, maupun aturan-aturan yang berlaku dalam persoalan masyarakat, tidak secara penuh dapat diterapkan oleh yang berwewenang, dalam hal ini disebabkan faktor-faktor politik dan kepentingan dari pemegang otoritas itu sendiri. Sebenarnya pemegang otoritas mengetahui secara anatomi persoalan-persoalan masyarakat, bahkan sangat memahaminya, etapi oleh karena sejumlah kepentingan maka aturan-aturan itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Contoh nyata kasus pendirian patung vihara Triratna di tanjungbalai telah menjadi keresahan masyarakat Muslim sejak tahun 2010, persoalan ini telah menimbulkan konflik, demonstrasi, dan rasa sakit dalam masyarakat, telah dilakukan kesepakatan untuk menurunkan patung dengan ditandatanganinya kesepakan oleh wali kota, FKUB, pengadilan, Kapolres kejaksaan, tetapi eksekusi tiak dilaksanakan hingga meletusnya kerusugan tanggal 29 juni 2016 kasus Meliani. Kasus Meliani secara materil berbeda dengan kansus pendirian patung Triratna, tetapi itu berhubungan secara psikologis, hal ini dapat terdeteksi dari penyampaian masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Tanjungbalai. Kasus patung terjadi tahun 2010 dan sarat dengan politik karena seiring dengan pemilu walikota saat itu, sedang kasus Meliani, adalah mengenai protes terhadap pengeras suara dari mesjid. Tetapi dengan terjadinya kasus Meliani tahun 2016 maka patung di Vihara Triratna dapat diturunkan. Jika kasus ini tidak ada hubunannya kenapa patung diturunkan, ini satu pertanyaan yang dapat dijawab dengan mudah karena secara psikologis keduanya berhubungan dan keduanya menyakiti hati umat Islam sebagai penduduk setempat, sedangkan yang membuat komplin dan permasalahan adalah etnis pendatang dan etnis asing. (dalam hal ini etnis cina)

Kasus ini menunjukkan kuatnya kepentingan dan politik didalamnya,

pemegang otoritas tidak mampu melaksanakan peraturan yang ditetapkannya dan amanah dari musyawarah dan kesepakatan yang telah dibuatnya, selama enam tahun kasus patung dibiarkan mengambang, tidak memperoleh penyelesaian hingga meletusnya kasus lain (kasus Meliani). Koflik yang terjadi secara teoritis penyelesaiannya dilakukann dengan prinsif resolusi, resolusi konflik selalu membutuhkan persyaratan-persyaratan, materil, sprituil atau sangsi yang harus dipenuhi. Kasus Meliani diselesaikan melaui pengadilan formal sesuai dengan hukum yang berlaku, sedang tuntutan masyarakat mensyaratkan turunnya patung di Vihara Triratna, dengan demikian kasus bisa selesai. Dan itu dilaksanakan dengan konsekwen maka kasus dianggap selesai. Penyelesaian kasus itu melibatkan institusi dan otoritas rasional formal dan kebijakan sosial dari tokoh-tokoh masyarakat (FKUB), meski tidak dilakukan dengan *kearifan lokal*, seperti konflik yang terjadi di Ambon (*pelagandong*), atau memotong kerbau seperti yang dilaksanakan oleh gubernur EWP. Tambunan di tanjungbalai ketika terjadi konflik antara tekong dari etnis Aceh dengan awak kapal ikan dari etnis melayu tahun 1979

Otoritas rasional formal tidak dapat bersifat mandiri dalam memutuskan persoalan, meskipun secara legal walikota seperti di Tanjungbalai merupakan pemilik otoritas kota, tetapi hal ini harus berkordinasi dengan elemen-elemen otoritas lainnya, termasuk kejaksaan, pengadilan, Polres, FKUB, kemeneg Agama, dan lain yang dari unsur Muspida. Karena itu otoritas formal disini bersifat kollegial birokratif dan dalam memutuskan sesuatu perkara tidaklah mudah.

C. Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk

mencapai tujuan yang dimaksud.[7] Dalam Konsep Riant Nugroho, analisa kebijakan menganalisa tiga fokus utama yakni, 1) Nilai, menganalisa pencapaian merupakan tolak ukur utama untuk menilai apakah masalah dapat teratasi, 2) Fakta, yang keberadaaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, 3) Tindakan, yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Dalam menganalisa kebijakan dapat dilakukan *ex post* atau *ex ante*.[8]

Kebijakan sebagai upaya dalam membangun masyarakat secara terarah, terencana dan sebagai panduan terhadap berbagai hal yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan. Kebikakan diambil sebagai sarana memecahkan kebuntuan-kebuntuan atau halangan-halangan, juga untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan (menyelesaikan masalah). Dalam pemerintahan telah ada arah kebijakan-kebijakan pemerintahyang disebut dalam arah, tujuan,peluang dan tantangan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Arah kebijakan itu di terjemahkan kedalam program setiap instani sesuai dengan tugas pokok dan fungsinnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Fahri (Ka-Kemenag tanjungbalai). Bahwa mereka melakukan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyaakat, melakukan koordinasi dengan instansi yang ada ditempat itu, Tugas pokok dan fungsinya telah ditetapkan, adapun dengan kasus-kasis konflik dalam masyarakat adalah tugas pokok instansi lain, seperti kesbang dan kapolres. Ketika dikonfirm dengan Polres, mereka mengatakan sebagai penjaga dan pelayan dalam mengamankan masyarakat, dan hanya melaksanakan tugas yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Namun untuk pelaksanaan tugasnya harus sesuai dengan kebijakan umum yang telah ditetapkan.

Kebijakan otoritas rasional terlihat sangat birokrat, terkesan bahwa praktek dari otoritas yakni kebijakan yang dilakukan sangat kaku karena aturan-aturan formal yang ada, bahkan terlihat para pemegang otoritas

---

[7] Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, 2008, AIPI, Bandung. Hal.7

[8] Riant Nugroho D. Analisa Kebijakan, 2007, PT Gramedia, Jakarta, hal. 13-14.

saling lempar. Contoh konflik yang terjadi di Tanjung Balai, Kemenag. mengatakan, itu tugas dari kepolisian (Polres), kemudian polres mengatakan itu harus melalui keputusan wali kota, dan wali kota mengatan itu tugas dari satker perangkat daerah. Kebijakan yang diambil seperti kebijakan bersama yang ditanatangani (wali kota, pengadilan, kejaksaan, polres dan FKUB) tentang penurunan patung di Tanjungbalai tidak dapat dieksekusi (ditindaklanjuti) hingga enam tahun, masyarakat menunggu keputusan pelaksanaannya dalam perasaan yang marah, menunggu saat-saat yang tepat, hal ini tentu tidak baik, karena menimbulkan kekacauan sosial dan kekerasan pisik bahkan dapat menimbulkan korban.

Kebijakan pemerinah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat menciptakan kenyamanan, ketertiban, keharmonisan dan kemajuan sosial sangat diharapkan karena merekalah pemegang otoritas yang memiliki kebijakan sosial. Namun terkadang kebijakan yang diambil tidak dapat dilaksanakan disebabkan beberapa hal menyangkut kepentingan dan politik.

BAB V

PENUTUP

Konflik, Otoritas dan Kebijakan di Sumatera Utara menunjukkan satu sama lainnya memiliki keterkaitan, bahwa kebijakan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya meski dengan otoritas yang tegas akan menimbulkan konflik. Konflik itu sendiri merupakan akibat dari interaksi yang tidak berkeseimbangan, dan kepentingan-kepentingan yang tumpang tindih dalam masyarakat, adanya perbedaan-perbedaan sosial, ekonomi, politik, etnisitas, pekerjaan, kultural, kelompok sosial dan agama selayaknya menuju harmoni dan keseimbangan, karena masing-masing segmen sosial memiliki ketergantungan alamiah satu sama lainnya. Pluralitas Sumatera Utara jika dilihat dari pandangan pesimis, memungkinkan terjadinya konfli-konflik, potensi itu sangat besar, apalagi pola budaya Sumatera Utara yang keras, tegas dan terbuka.

Otoritas yang ada sekarang dan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan seperangkat aturan hukum formal, yang dijalankan secara birokratif dan dengan otoritas kollegial. Pemegang otoritas yakni pemerintah provinsi dan kota, tidak sepenuhnya menjalankan kewenangannya, yang berjalan dalam sistim pemerintahan adalah otoritas administratif, tidak seimbang dengan ororitas kebijakan dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang diambil sehubungan dengan konflik-konflik yeng terjadi dimasyarakat. Kasus-kasus konflik terlihat kurang memiliki penanganan, kecuali konflk-konflik yang mencuat atau telah menjadi isu besa, selebihnya malah seperti pembiaran, dan jikapun diselesaikan lewat pengadilan berdasarkan hukum formal yang berlaku tidak memenuhi kepuasan masyarakat, melainkan sekedar

bahwa konflik itu telah tuntas, namun kemungkinan akan menyulut konflik lainnya. Hal ini dapat saja terjadi jika aspek-aspek pendukungnya terpenuhi. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dengan seperangkat aturan-aturan dapat saja menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi, tetapi tidak mustahil menyulut konflik lainnya, seperti kasus Patung di Tanjungbalai.

Konflik yang terjadi dalam masyarakat dan menjadi isu nasional seperti kasus patung dan Meliani di Tanjungbalai dikatakan bukan konflik *sara*, tetapi tidak dipastikan konflik apa (?), bukan konflik ekonomi atau bukan konflik kultural, bukan konflik sosial. Sehingga peneliti dengan melakukan penelusuran pakta-pakta yang ada dan penuturan para sabjek penelitian Konflik yang terjadi adalah konflik *sara yang tumpangtindih dengan paktor ekonomi dan kultural (pelanggaran terhadap nilai-nilai kearifan lokal)*

Masyarakat Sumatera Utara yang pluralis; multi sosial, kultural, ras, etnis, politik, kelompok sosial, kepentingan, agama dan kepercayaan merupakan potensi konflik yang besar yang di dukung oleh pola budaya dan karakter orang sumut, keras, tegas dan terbuka. Berdasarkan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dimana pola kebijakan yang dilakukan belumlagi sepenuhnya terlaksana, akibat dari sifat birokrasi kaku, sementara otoritas tradisional dan kharismatik yang selama ini kuat ditengah-tengah masyarakat tidak ada lagi, maka sepenuhnya masyarakat bertumpu kepada otoritas rasional formal. Jika pemerintah provinsi-kota tidak berhati-hati maka dapat saja menimbulkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Fisher Simon, 2000, *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, The British Council, Jakarta.

George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, 2007, Kencana, Jakarta.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 1998, UGM: Yogyakarta,.

Kantor Kementerian Agama Kota Medan, *Kota Medan Dalam Angka 2016, 2016*, Badan Pusat Statistik Kota Medan.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 1996, Mandar Maju: Bandung.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 1997 Gramedia, Jakarta,.

Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik, 2014, Prenada Media Group, Jakarta.

Vernon dalam Afif Muhammad, *Agama dan Konflik Sosial, Studi Pengalaman Indonesia*, 2013, Penerbit Marja, Bandung..

Thomas Santoso, Teori-Teori Kekerasan, 2002, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah. Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kota Medan

Husnel Anwar Matondang (ed), *Tujuh Butir Peluru Untuk Negeriku*, Medan. Pen. Perdana Publishing, cet I. 2017

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Pen. PT Gramedia Pustaka Utama, Edisi revisi, cet. II. 2008

Dikky Sofyan dkk, *Religion Public Policyand social transpormation in southeast Asia*. Managing religious Diversity Voll I Globetics Nett

2016. *Mengelola Keragaman Beragama*. Seri Buku I. *Agama Kebijakan Publik dan transpormasi sosial di Asia tenggara* 2013-2016

Henk Schulte Nordolt and Grryvan Klinken (eds). *Renegotiating Bounderies; Local Politiks inPost Soeharto Indonesia*, Leiden KITLVPress 2007.

Ahmad Zainul Hamdi Muktafi (ed) *Wacana dan Praktik pluralisme Keagamaan di Indonesia*, Jakarta, Pen. Daulat Press, cet. I 2017

Alefteris Washim dkk. *Harmoni Kehidupan Beragama*; Problem, Praktik dan Pendidikan, ProccidingConfrensi Regional Yokyakarta, 2005

2. Internet:

http://tanjungbalaikota.go.id/agama-adat-dan-budaya

http://kotaMedan.go.id/Kota Medan dalam Angka 2016

http://.Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi/ Tebing Tinggi Dalam Angka 2016

KONFLIK, OTORITAS DAN KEBIJAKAN

DI SUMATERA UTARA

Konflik dapat saja terjadi dalam kehidupan sosial termasuk kehidupan antar umat beragama. Konflik dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain faktor identitas yang terancam, pemenuhan kebutuhan manusia, kesalahpahaman antar budaya, maupun ketidakpercayaan dan permusuhan. Telah banyak konflik yang terjadi Indonesia, Mulai dari konflik pertanahan di Sumatera Utara pada masa Revolusi Sosial pada awal kemerdekaan, koflik Maluku pada awal 90-an, konflik Poso, Konflik Kalimantan, hingga konflik skala lokal seperti di Tolikara Papua, dan kerusuhan Mei 1998 yang menjurus SARA.

Di Sumatera Utara sendiri konflik kekerasan telah terjadi berulang kali. Sebut saja konflik pertanahan mulai dari Deli Serdang hingga Tapanuli Selatan dimulai sejak masa penjajahan VOC hingga saat ini, konflik antara nelayan tradisional di Kabupaten Deli Serdang, Langkat dan Serdang Bedagai sejak tahun 1997, konflik antara organisasi kepemudaan di kota Medan dan Tebing Tinggi tahun 1992, keributan penggusuran warga di bantaran rel kereta api tahun 2015 dan yang terakhir adalah konflik penempatan pengungsi di Kabupaten Karo tahun 2016 dan konflik kekerasan dengan pembakaran vihara dan klenteng di Tanjungbalai tahun 2016.

Perdana Publishing
PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151620
Fax 061-7347756 Email: perdanapublishing@gmail.com

ISBN 978-602-5674-87-7